

**PERAN IMEUM MUKIM DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK**

(Studi Kasus Konflik Antar Warga Masyarakat Kemukiman Kandang  
Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**DODI SANIVAL**

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prodi Manajemen Dakwah

NIM: 431307358



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2018 M / 1439 H**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dalwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu  
Beban Studi Program Sarjana S-1  
Dalam Manajemen Dakwah

Oleh:

**DODI SANIVAL**

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Prodi Manajemen Dakwah  
NIM: 431307358

Disetujui oleh:

**Pembimbing I**



**Dr. Juhari, M.Si**

NIP. 19661231 199402 1 006

**Pembimbing II**



**Raihan, S.Sos.I., MA**

NIP. 19811107 200604 2 003

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Dinyatakan  
Lulus dan Disahkan sebagai Tugas Akhir  
Penyelesaian Program Sarjana S1  
dalam Ilmu Dakwah**

**Pada Hari/Tanggal**

Seasa: 30 Januari 2018 M  
13 Jumadil Awal 1439 H

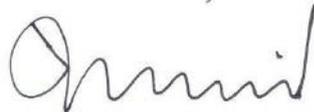
Oleh:

**DODI SANIVAL**  
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Prodi Manajemen Dakwah  
NIM: 431307358

Di Darussalam Banda Aceh

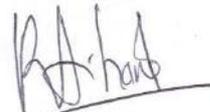
**PANITIA SIDANG MUNAQASYAH**

**Ketua,**



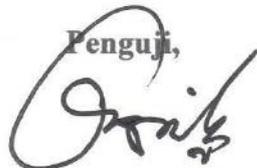
**Dr. Juhari, M.Si**  
NIP. 19661231 199402 1 006

**Sekretaris**



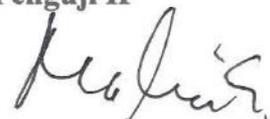
**Raiban, S.Sos.I., MA**  
NIP. 19811107 200604 2 003

**Penguji,**



**Dr. Jailani, M.Si**  
NIP. 19601008 199503 1 101

**Penguji II**



**Drs. H. Maimun Ibrahim, MA**  
NIP. 19530906 198903 1 001

Mengetahui,

↳ Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh



  
**Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd**  
NIP. 19641220 198412 2 001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dodi Sanival  
NIM : 431 307 358  
Tempat/ Tgl Lahir : Desa Jua, 31 Oktober 1995  
Alamat : Desa Jua Kecamatan Kluet Selatan  
Kabupaten Aceh Selatan, 23772

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul Peran Imeum Mukim dalam Menyelesaikan Konflik (Studi Kasus Konflik Antar Warga Masyarakat Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan). Adalah benar-benar Karya Asli Saya, kecuali lampiran yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menadi tanggung jawab saya.

Demikaian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Januari 2018

Saya yang menyatakan



**Dodi Sanival**

NIM. 431 307 358



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mendapat hikmah itu Sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak, Dan tiadalah yang menerima peringatan melainkan orang-orang yang berakal”.

(Q.S. Al-Baqarah: 269)

Alhamdulillahirabbil' alamin . . .

Akhirnya aku sampai ke titik ini,

sepercik keberhasilan yang Engkau hadiahkan padaku ya Rabb

Tak henti-hentinya aku mengucapkan syukur pada-Mu ya Rabb

Serta shalawat dan salam kepada idola ku Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia

Semoga sebuah karya mungil ini menjadi amal shaleh bagiku dan menjadi kebanggaan bagi keluargaku tercinta

Ku persembahkan karya mungil ini . . .

untuk belahan jiwa ku bidadari surgaku yang tanpamu aku bukanlah siapa-siapa di dunia fana ini Ibundaku tersayang (**Basnidar**)

serta orang yang menginjeksikan segala idealisme, prinsip, edukasi dan kasih sayang berlimpah dengan wajah datar menyimpan kegelisahan ataupun perjuangan yang tidak pernah ku ketahui, namun tenang temaram dengan penuh kesabaran dan pengertian luar biasa Ayahandaku tercinta (**Muctadin**) yang telah memberikan segalanya untukku

Kepada Adik-Adikku (**Imam Ari Wahyudi**), (**Octa Delfitra**), dan (**Ridho Al-A'raf**)

terima kasih tiada tara atas segala support yang telah diberikan selama ini dan semoga Adik-adikku tercinta dapat menggapai keberhasilan juga di kemudian hari.

Kepada teman-teman seperjuangan khususnya rekan-rekan Prodi Manajemen Dakwah 2013 yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu terima kasih yang tiada tara ku ucapkan

Terakhir, untuk seseorang yang masih dalam misteri yang dijanjikan Ilahi yang siapapun itu, terimakasih telah menjadi baik dan bertahan di sana.

Akhir kata, semoga skripsi ini membawa keberuntungan. Jika hidup bisa kuceritakan di atas kertas, entah berapa banyak yang dibutuhkan hanya untuk kuucapkan terima kasih . . .



by: Dodi Sanival

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Peran Imeum Mukim Dalam Menyelesaikan Konflik (Studi Kasus Konflik Antar warga Masyarakat Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan). *Imeum Mukim* sebagai penyelesaian sengketa didalam masyarakat dan sebagai tokoh utama dalam pembuatan keputusan dalam penyelesaian konflik yang terjadi, memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat karena setiap kata dan ucapan yang disampaikan *Imeum Mukim* di depan masyarakat menjadi pedoman didalam kehidupan sosial masyarakat tersebut, sehingga *Imeum Mukim* akan di hormati dan disegani dalam setiap pemutus perkara yang ada dimasyarakat. Sehingga pengambilan keputusan nantinya menjadi pemecahan masalah yang dihadapi, dapat diselesaikan dengan tegas dan memberikan setiap jawaban atas permasalahan dan tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tak terkecuali Pemerintahan Mukim yang ada di Aceh dan Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan khususnya, *imeum mukim* juga harus mampu menyelesaikan setiap persoalan dan permasalahan yang muncul di wilayahnya dapat diselesaikan dengan baik sehingga tercipta kondisi masyarakat yang aman. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Ingin mengetahui apa saja bentuk-bentuk konflik dalam masyarakat di Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, bagaimana peran imeum mukim Kandang dalam menyelesaikan konflik masyarakat di Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan dan bagaimana cara imeum mukim Kandang dalam menyelesaikan konflik antar warga masyarakat di Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti melakukan *field research* yang bersumber dari lapangan observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian ini adalah adapun konflik yang sering terjadi masyarakat Kemukiman Kandang yaitu: *pertama* destruktif yang merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain, diantaranya adalah masalah hutang piutang, konflik batas tanah, konflik jual beli, dan konflik harta warisan. *Kedua* konflik konstruktif yang merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan, diantaranya adalah konflik suporter bola (tarkam), konflik penjualan batu/pasir sungai, konflik perempuan, dan konflik perebutan lahan parkir. Peran *imeum mukim* Kandang dalam menyelesaikan konflik dimasyarakat masih belum berperan maksimal, dimana tidak adanya langkah-langkah kongkrit atau upaya dalam menyelesaikan konflik ini semua disebabkan *imeum mukim* Kandang tidak memiliki atau dilengkapi struktural yang disokong oleh instrumen hukum, sehingga banyak peran fungsi dan peran daripada *imeum mukim* Kandang itu agak sedikit hilang. Adapun cara penyelesaian konflik oleh *imeum mukim* Kandang adalah dengan cara tanpa vonis dengan berdasarkan kesepakatan dari beberapa elemen masyarakat seperti *tuha peut*, tokoh pemuda, *teungku imum*, *keuchik* serta pihak yang berkonflik. Hal ini dilakukan agar tidak ada yang merasa di rugikan dan dibedakan.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan anugerah, kesempatan, taufiq serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akademik ini dengan baik. Selawat dan salam penulis hadirkan tak henti-hentinya kepada revolusioner dunia yang telah berhasil mengubah *mindset* dan paradigma manusia untuk bertindak dan berkontribusi inovatif demi kebaikan dan kemaslahatan seluruh penghuni jagat raya ini. Salam penghormatan penulis sampaikan juga kepada seluruh keluarga sahabat beliau yang selalu setia sampai hayat demi memperjuangkan tegaknya *Dinul Haq* di persada bumi ini.

Akhirnya ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis hanturkan kepada Ibunda Basnidar dan Ayahanda Muktadin yang telah mendidik mengasuh penulis dengan kasih sayang dan do'anya selalu mengiringi penulis setiap saat sejak kecil sampai menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi, yang penulis banggakan ini kepada adik-adikku Imam Ari Wahyudi, Octa Delfitra, dan Ridho Al'-A'rafa yang telah mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis. Penulis menyadari tidak dapat membalasnya, hanya do'a yang penulis panjatkan semoga jerih payah dan ketulusan keduanya diridhai dan dibalas oleh Allah SWT kelak di *Yaumul Masyar*.

Alhamdulillah berkat *Inayah* dan *hidayah*-Nyalah, penulis telah selesai menyusun skripsi yang sangat sederhana ini untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh dan mencapai gelar Sarjana pada Program Studi

Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul **“Peran Imeum Mukim Dalam Menyelesaikan Konflik (Studi Kasus Konflik Antar Warga Masyarakat Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan).”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan semua pihak, maka pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Juhari, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Raihan, S.Sos.I., MA selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.
2. Ibu Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Wakil Dekan beserta Staffnya yang telah ikut membantu dan memberikan saran dan arahan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Jailani, M.Si Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Wakil Ketua beserta Staffnya yang telah ikut membantu dan memberikan saran dan arahan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Mahmuddin, M.Si selaku Penasihat Akademik yang telah banyak membantu penulis.

5. Kepada seluruh Dosen selingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah.
6. Pimpinan dan staf perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pimpinan dan staf perpustakaan Wilayah Provinsi Aceh, Pimpinan dan staf perpustakaan Mesjid Raya Baiturrahman dan pimpinan dan staf perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang selalu memberikan waktu dan izin kepada penulis untuk membaca dan mencari referensi yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan sejawat dan seluruh mahasiswa/i Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sering memberikan masukan dan arahan, motivasi serta atensi demi terwujudnya penulisan karya ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih sangat banyak kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif guna perbaikan guna yang akan datang.

Banda Aceh, 16 Januari 2018

Penulis



**Dodi Sanival**

NIM. 431307358

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penjelasan Istilah .....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Konsep Kepemimpinan .....	13
1. Pengertian Kepemimpinan.....	13
2. Kriteria Seorang Pemimpin.....	14
3. Sifat-Sifat Kepemimpinan .....	15
4. Fungsi Kepemimpinan.....	16
5. Peran Kepemimpinan.....	17
6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemimpinan .....	18
B. Kepemimpinan dalam Perspektif Islam. ....	19
1. Kriteria Kepemimpinan Islami .....	19
2. Fungsi Kepemimpinan dalam Islam .....	20
3. Sifat Kepemimpinan Islam .....	21
4. Teladan Kepemimpinan dalam Islam .....	24
C. Kepemimpinan Imeum Mukim .....	28
1. Pengertian Mukim .....	28
2. Imuem Mukim sebagai pemimpin adat/informal .....	31
3. Imuem mukim Sebagai pemimpin pemerintahan/formal ..	32
4. Tugas dan Fungsi Imeum Mukim.....	34
D. Konflik.....	35
1. Pengertian Konflik.....	35
2. Bentuk-bentuk Konflik .....	38

	3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik.....	39
	4. Dampak dari Adanya Konflik terhadap Masyarakat .....	40
	5. Upaya-upaya Untuk Mengatasi Konflik.....	41
	H. Penelitian Terdahulu.....	43
<b>BAB III</b>	<b>: METODELOGI PENELITIAN</b>	
	A. Lokasi Penelitian .....	46
	B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
	C. Sumber Data .....	47
	D. Teknik Pengumpulan Data .....	48
	E. Teknik Analisi Data.....	49
	F. Intrumen Pengumpulan Data.....	50
<b>BAB IV</b>	<b>: HASIL PENELITIAN</b>	
	A. Gambaran Umum Tempat Penelitian .....	51
	B. Bentuk-bentuk Konflik di Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.....	54
	C. Peran Imeum Mukim Kandang dalam Penyelesaian Konflik di Masyarakat .....	59
	D. Cara Imeum Mukim dalam Menyelesaikan Konflik di Masyarakat .....	63
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	68
	B. Saran.....	69
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	
	<b>DATA RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di tengah berbagai permasalahan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dibutuhkan kehadiran pemimpin sebagai solusi dari segala permasalahan tersebut. Pemimpin merupakan pemandu dan panutan bagi pengikutnya. Tanpa mereka maka suatu kelompok (organisasi) bisa kacau. Namun masalah yang sangat mendasar dalam proses kepemimpinan adalah sulitnya mendapatkan pemimpin yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga kehadiran pemimpin amat diperlukan, untuk mendapatkan jalan keluar dari berbagai persoalan. Kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan seseorang (pemimpin atau *leader*) untuk mempengaruhi orang lain (orang yang dipimpin atau para pengikut), sehingga orang lain tersebut bertindak laku sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemimpin.<sup>1</sup> Northouse merangkum dari 65 klasifikasi atas definisi kepemimpinan dari berbagai perspektif, ada empat unsur dalam memahami pengertian kepemimpinan, pertama adalah kepemimpinan itu proses, kedua setiap kepemimpinan adanya pengaruh, ketiga konteks kepemimpinan adanya kelompok dan unsur yang terakhir adalah pencapaian tujuan. Sehingga defmisi kepemimpinan adalah suatu proses dimana seseorang punya pengaruh dalam satu kelompok (organisasi) untuk menggerakkan individu lain meraih tujuan bersama.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 288.

<sup>2</sup>M. Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 65.

Sumber pengaruh yang dimiliki oleh seorang pemimpin bisa didapat secara formal dan informal. Sumber pengaruh formal didapat oleh seorang pemimpin apabila ia berada pada posisi jabatan atau majerial tertentu dalam sebuah kelompok, memiliki dasar legalitas, diangkat secara resmi dan memiliki hak dan kewajiban yang tegas sesuai dengan jabatannya, seperti presiden disebuah negara, ketua umum partai dan direktur sebuah perusahaan. Sedangkan sumber pengaruh seorang pemimpin informal atau tidak resmi didapat dari organisasi atau kelompok masyarakat yang tidak formal, dan tidak tergantung pada acuan formal dan legitimasi. Sumber kepemimpinan informal ini sangat tergantung pada pengakuan kelompok dan komunitasnya. Sehingga pemimpin harus memiliki kualitas yang benar-benar unggul. Contohnya seperti pemuka agama, tokoh masyarakat dan adat.<sup>3</sup>

Konsep tentang kepemimpinan erat kaitannya dengan kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan (*power*) adalah setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, sedangkan wewenang (*authority*) adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Penggunaan wewenang timbul tatkala masyarakat mulai mengatur pembagian kekuasaan dan menentukan penggunaannya.<sup>4</sup> Maka kekuasaan tanpa wewenang disebut sebagai kekuatan yang tidak sah. Kekuasaan harus mendapatkan pengakuan dan pengesahan dan masyarakat yang di sebut sebagai wewenang.

---

<sup>3</sup>Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 4.

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, ..., hlm. 266.

Max Weber membagi kepemimpinan dan wewenangnya menjadi tiga: tradisional, rasional dan karismatik.<sup>5</sup> Pengertian pertama, pemimpin tradisional mendapatkan wewenangnya di masyarakat berdasarkan ketentuan-ketentuan di masyarakat secara tradisional. Biasanya berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, atau didapat secara turun temurun berdasarkan tradisi yang diwarisi, seperti raja.

Kedua, pemimpin rasional adalah kepemimpinan yang wewenangnya didasarkan pada hukum dan kaidah-kaidah yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat. Pada masyarakat yang menerapkan nilai-nilai demokratis, biasanya pemimpin yang mendapatkan kekuasaan diberi kedudukan menurut jangka waktu tertentu dan terbatas. Wewenang rasional biasa disebut sebagai wewenang absah atau legal atau bikorasi. Contohnya seperti presiden, perdana menteri, gubernur, bupati, dan camat.<sup>6</sup>

Ketiga, pemimpin karismatik yaitu didasarkan pada seseorang yang mempunyai kemampuan khusus yang didapatkan karena anugrah. Wewenang ini tidak diatur oleh kaidah-kaidah tradisional dan rasional, bahkan sifatnya cenderung irasional. Adakalanya wewenang karismatik bisa hilang dari seorang pemimpin manakala masyarakatnya sendiri telah berubah dan mempunyai faham yang berbeda, dan karisma bisa saja bertahan dan bahkan meningkat sesuai dengan individu yang bersangkutan membuktikan manfaat bagi masyarakat dan pengikut-pengikutnya akan menikmatinya. Sekarang ini istilah *kepemimpinan karismatik* digunakan semakin luas dan kurang saksama. Hampir semua

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, ..., hlm. 285.

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, ..., hlm. 285.

pemimpin memiliki daya tarik dan popularitas sehingga semuanya dapat dikategorikan sebagai pemimpin karismatik.<sup>7</sup>

Selanjutnya Berdasarkan pendekatan historis, masyarakat Aceh dapat dikelompokkan pada dua golongan kepemimpinan, yaitu golongan *umara* dan golongan ulama. *Umara* dapat diartikan sebagai pemerintah atau pejabat pelaksana pemerintah dalam suatu unit wilayah kekuasaan. Contohnya seperti jabatan sultan yang merupakan pimpinan atau pejabat tertinggi dalam unit pemerintahan kerajaan, *Uleebalang* sebagai pimpinan unit pemerintahan *Nanggroe* (negeri), Panglima *Sagoe* (Panglima Sagi) yang memimpin unit pemerintahan Sagi (di Aceh Besar), *Imeum Mukim* yang menjadi pimpinan unit pemerintahan Mukim dan *Keuchik* atau *Geuchik* yang menjadi pimpinan pada unit pemerintahan *Gampong* (kampung). Mereka semua atau pejabat tersebut di atas, dalam struktur pemerintahan di Aceh pada masa dahulu secara hierarkis dikenal sebagai lapisan pemimpin adat, pemimpin keduniawian atau kelompok elite sekuler.<sup>8</sup>

Sementara golongan ulama yang menjadi pimpinan yang mengurus masalah-masalah keagamaan (hukum atau syariat Islam) dikenal sebagai pemimpin keagamaan atau masuk kelompok elite religius. Oleh karena para ulama ini mengurus hal-hal yang menyangkut keagamaan, maka mereka haruslah seorang cendekiawan yang berilmu agama Islam, yang dalam istilah Aceh disebut

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, ..., hlm. 285.

<sup>8</sup>Agus Budi Wibowo, *Sistem Kepemimpinan Pada Etnis Aceh Di Aceh Acehese Leadership System*, hlm. 15  
([https://www.academia.edu/3450216/SISTEM\\_KEPEMIMPINAN\\_PADA\\_ETNIS\\_ACEH\\_DI\\_ACEH\\_System\\_Leadership\\_in\\_Acehnese\\_in\\_Aceh\\_](https://www.academia.edu/3450216/SISTEM_KEPEMIMPINAN_PADA_ETNIS_ACEH_DI_ACEH_System_Leadership_in_Acehnese_in_Aceh_) diakses pada tanggal 10 Maret 2017).

*ureueng malem*. Dengan demikian tentunya sesuai dengan predikat/sebutan ulama itu sendiri, yang berarti para ahli ilmu atau para ahli pengetahuan.

Bentuk teritorial yang lebih besar lagi dari *Gampong* yaitu Mukim. Mukim ini merupakan gabungan dari beberapa buah *Gampong* yang letaknya berdekatan dan para penduduknya melakukan sembahyang bersama pada setiap hari Jumat di sebuah masjid. Pimpinan Mukim disebut sebagai Imum Mukim. Perkataan Imum ini berasal dari bahasa Arab, artinya Imam (orang yang harus diikuti). Imum Mukim inilah yang bertindak sebagai pemimpin sembahyang pada setiap hari Jumat di sebuah masjid. Pada awalnya dibentuk setiap mukim diharuskan sekurang-kurangnya mempunyai 1000 orang laki-laki yang dapat memegang senjata. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk tujuan politis, yaitu bila terjadi peperangan dengan pihak luar agar mudah menghimpun tenaga-tenaga tempur. Dalam perkembangannya fungsi Imum Mukim menjadi kepala pemerintahan dari sebuah Mukim. Dialah yang mengkoordinir kepala-kepala kampung atau *Keuchik-Keuchik*. Dengan berubahnya fungsi Imum Mukim berubah pula nama panggilannya, yakni menjadi Kepala *Mukim/uleepalang cut*. Untuk pengganti sebuah imam sembahyang pada setiap hari Jum'at di sebuah masjid, diserahkan kepada orang lain yang disebut *Imuem Mesjid* seperti disebut diatas.

Selanjutnya keberadaan Mukim di Aceh mengalami pasang surut dan sejarah panjang dari masa ke masa, dimulai pada masa kesultanaan Aceh, pemerintahan Belanda, pemerintahan Jepang, awal kemerdekaan, orde lama, orde baru, orde reformasi hingga saat ini. Saat ini mukim merupakan salah satu keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki Provinsi Aceh yang diatur dalam

berbagai peraturan perundang-undangan. Mukim secara konseptual juga merupakan sebagai salah satu pelaksana pemerintahan dan adat di Aceh. Pembaharuan Mukim masih terbatas pada susunan organisasi pemerintahan. Untuk mengembalikan mukim sebagai lembaga pemerintahan khas di Aceh, diperlukan sebuah upaya yang perlu dilakukan dalam memperjuangkan dan sekaligus revitalisasi keberadaan mukim.<sup>9</sup>

Begitu juga dengan keberadaan Mukim Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, dimana *Imeum Mukim* Kandang membawahi beberapa *Gampong* yaitu *Gampong* Kedai Kandang, *Gampong* Luar, *Gampong* Ujung, *Gampong* Jua, *Gampong* Pisie Merapat, *Gampong* Ujung Pasir, dan *Gampong* Geulumbuk.<sup>10</sup> *Imeum Mukim* juga terjadi pasang surut dalam mengelola pemerintahannya, terutama dikaitkan dengan penyelesaian konflik di masyarakatnya terkadang mereka tidak bisa mengatasi hal tersebut. Seharusnya dengan adanya lembaga *Imeum Mukim*, maka kesenjangan-kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan baik. Akan tetapi pada kenyataan keberadaan *Imeum Mukim* belum dirasakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan kesenjangan dan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai lembaga pemerintahan yang ada di Pemerintah Aceh, dengan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki maka *Imeum Mukim* mempunyai tugas dalam

---

<sup>9</sup>Mukhlis, *Perkembangan Mukim di Aceh*, Jurnal Nanggroe Volume 4 Nomor 2 (Agustus 2015), hlm. 2. (<http://nanggroe.unimal.ac.id/index.php/nanggroe/article/view/53/53> diakses pada tanggal 10 Maret 2017).

<sup>10</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Statistik Kecamatan Kluet Selatan 2015*, (Aceh Selatan: BPS Aceh Selatan, 2015), hlm. 12.

pelayanan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan dalam lingkungan masyarakat di dalam suatu *Gampong*.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“Peran *Imeum Mukim* Dalam Menyelesaian Konflik (Studi Kasus Antar Warga Masyarakat Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan).”**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Apa saja bentuk-bentuk konflik dalam masyarakat di Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana peran *Imeum Mukim* Kandang dalam menyelesaikan konflik masyarakat di Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan?
3. Bagaimana cara *Imeum Mukim* Kandang dalam menyelesaikan konflik antar warga masyarakat di Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah Camat, *Imeum Mukim*, *Keuchik*, *Tengku Imeum* dan beberapa masyarakat secara acak di Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Yasmazi *Imeum Mukim* Kandang, (tanggal 8 Januari 2017 pukul 10:14 WIB).

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Ingin mengetahui apa saja bentuk-bentuk konflik dalam masyarakat di Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.
2. Ingin mengetahui bagaimana peran *Imeum Mukim* Kandang dalam menyelesaikan konflik masyarakat di Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.
3. Ingin mengetahui bagaimana cara *Imeum Mukim* Kandang dalam menyelesaikan konflik antar warga masyarakat di Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dan manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Secara subjektif, sebagai suatu sarana melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian teori dan aplikasinya yang di peroleh dari perkuliahan.
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh secara umum dan Prodi Manajemen Dakwah secara khusus dalam dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakannya.

3. Secara praktis, bagi Mukim Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih pemikiran informasi dan saran.

## F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari timbulnya ke simpang siuran dalam memahami karya ilmiah ini, penulis ingin menjelaskan arti istilah yang berhubungan dengan permasalahan penulisan.

### 1. *Imeum Mukim*

*Imeum Mukim* atau nama lain adalah kepala pemerintahan mukim<sup>12</sup>, dan mukim berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa *Gampong* yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.<sup>13</sup>

### 2. Konflik

Istilah “konflik” secara istilah berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan.<sup>14</sup> Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Konflik artinya percekocokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan.<sup>15</sup> Selanjutnya

---

<sup>12</sup>Pasal 1 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

<sup>13</sup>Pasal 2 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

<sup>14</sup>Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

<sup>15</sup>WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992).

Konflik juga proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.<sup>16</sup>

### 3. Masyarakat

Masyarakat merupakan istilah yang sangat lazim digunakan untuk menyebut suatu kesatuan-kesatuan manusia yang berasal dari bahasa Arab yaitu *syaraka* yang berarti ikut serta, berpartisipasi, yang kemudian mengalami perubahan dalam bahasa Indonesia menjadi masyarakat. Masyarakat adalah suatu kesatuan manusia yang saling berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan saling terikat oleh suatu rasa dan identitas yang sama dalam dirinya.<sup>17</sup>

### 4. Kemukiman

Mukim atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa *Gampong* yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat atau nama lain yang dipimpin oleh *Imeum Mukim* atau nama lain.<sup>18</sup> Kemukiman ini berasal dalam wilayah Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa peran *Imeum Mukim* dalam penyelesaian konflik peranannya sangatlah penting dimana pelaksanaan putusan dipresentasikan *Imeum Mukim* sehingga putusan yang diambil merupakan

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 99.

<sup>17</sup>Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 144-146.

<sup>18</sup>Pasal 1 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

keputusan yang kuat karena merupakan keputusan semua unsur pimpinan yang mewakili masyarakat. Sebab itu pula dapat diperkirakan didukung oleh semua unsur yang ada dalam masyarakat. *Imeum Mukim* adalah orang yang dipercaya untuk memimpin suatu mukim yang membawahi beberapa *Gampong* melalui tahap pemilihan yang menghadirkan *keucik* serta tokoh adat dan orang yang dituakan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan penelitian ini, maka pembahasan dibagi ke dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab pertama pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah (imam mukim, konflik, masyarakat, kemukiman, kecamatan dan kabupaten) dan sistematika pembahasan.

Bab kedua landasan teoritis yang membahas konsep kepemimpinan (pengertian kepemimpinan, kriteria seorang pemimpin, sifat-sifat kepemimpinan, fungsi kepemimpinan, peran kepemimpinan, faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan), kepemimpinan dalam perspektif islam (kriteria kepemimpinan islami, fungsi kepemimpinan dalam islam, sifat kepemimpinan islam, teladan kepemimpinan dalam islam ), kepemimpinan imeum mukim (pengertian mukim, imeum mukim sebagai pemimpin adat/informal, imeum mukim sebagai pemimpin pemerintahan/formal, tugas dan fungsi imeum mukim), konflik (pengertian konflik, bentuk-bentuk konflik, faktor-faktor penyebab terjadinya

konflik, dampak dari adanya konflik terhadap masyarakat, upaya-upaya untuk mengatasi konflik) dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga metodologi penelitian yang membahas lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan instrumen pengumpulan data .

Bab empat hasil penelitian yang membahas gambaran umum tempat penelitian, bentuk-bentuk konflik di kemukiman kandang kecamatan kluet selatan kabupaten aceh selatan, peran imeum mukim kandang dalam penyelesaian konflik di masyarakat dan cara imeum mukim dalam menyelesaikan konflik di masyarakat

Bab kelima, merupakan bab penutup yang memuat semua kesimpulan dan saran dari permasalahan yang dibahas.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Konsep Kepemimpinan

##### 1. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut *Leadership* dan dalam bahasa Arab disebut *Zi'amah* atau *Imamah*. Menurut terminologi kepemimpinan adalah menyangkut dalam menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasi motif-motif dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama.<sup>1</sup>

Kepemimpinan merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang menduduki posisi strategis dalam sistem dan hirarki kerja dan tanggung jawab pada sebuah organisasi.<sup>2</sup> Berikut merupakan definisi dari kepemimpinan, berdasarkan para pakar:

- a. Stephen P. Robbins mengatakan, kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan.<sup>3</sup>
- b. Richard L. Daft mengatakan, kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan.<sup>4</sup>
- c. Georger R. Terry, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk berusaha mencapai tujuan bersama.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Hamzah Zakub, *Menuju Keberhasilan, Manajemen dan Kepemimpinan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 125.

<sup>2</sup>Nasharuddin Baidan dan Erwati Aziz, *Etika Islam dalam Berbisnis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 126.

<sup>3</sup>Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi*, terj. Tim Indeks, (Jakarta: Indeks, 2003), hlm. 50.

<sup>4</sup>Richard L. Daft, *Manajemen*, terj. Emil Salim dan Iman Karmawan, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 50.

<sup>5</sup>Brantas, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 125.

- d. Ricky W. Griffin mengatakan, pemimpin adalah individu yang mampu memengaruhi orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan; pemimpin adalah individu yang diterima oleh orang lain sebagai pemimpin.<sup>6</sup>

Dari beberapa pendapat para pakar diatas penulis mendefinisikan kepemimpinan adalah suatu usaha untuk mengarahkan, membimbing dan memotivasi serta bersama-sama mengatasi problem dalam proses pencapaian tujuan suatu organisasi. Selanjutnya sedikitnya terdapat empat alasan mengapa seorang pemimpin dibutuhkan. *Pertama*; secara alamiah manusia butuh untuk diatur. *Kedua*; dalam beberapa situasi seorang pemimpin perlu tampil mewakili kelompoknya. *Ketiga*; sebagai tempat pengambil alihan resiko apabila terjadi tekanan terhadap kelompoknya. *Keempat*; sebagai tempat untuk meletakkan kekuasaan.<sup>7</sup>

## 2. Kriteria Seorang Pemimpin

Menurut Kartini Kartono mengemukakan kriteria seorang pemimpin, sebagai berikut:

- a. Kapasitas: kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara (*verbal vacility*), keaslian, kemampuan menilai.
- b. Prestasi (*achievement*): gelar keserjanaan, ilmu pengetahuan, perolehan dalam olah raga dan atletik dan lain-lain.
- c. Tanggung jawab: Mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percara diri, agresif dan punya hasrat untuk unggul.
- d. Partisipasi: aktif, memiliki sosiabilitas tinggi, mampu bergaul, kooperatif atau suka bekerjasama, mudah menyesuaikan diri, punya rasa humor.
- e. Status: Meliputi kedudukan sosial-ekonomi yang cukup tinggi, populer, tenar.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Ricky W. Griffin, *Manajemen*, terj. Gina Gania, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 68.

<sup>7</sup>Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 1-2.

<sup>8</sup>Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 31.

Dari semua teori diatas dihadirkan agar pemimpin di hadir di masyarakat nantinya betul-betul bisa mengayomi seluruh masyarakat nantinya. Apalagi menurut penulis kepemimpinan di zaman modern seperti sekarang ini tidak hanya bekerja sendiri, tetapi juga melibatkan pengikut atau orang yang dipimpinya. Dalam proses ini melibatkan niat dan keinginan, pemimpin dan pengikut yang terlibat aktif, sehingga tercapai tujuan yang sama. Jadi semua elemen berpartisipasi aktif, supaya terjalin keakraban dan semua tujuan bisa tercapai dengan lebih mudah.

### **3. Sifat-Sifat Kepemimpinan**

Menurut Susilo Martoyo, ada beberapa sifat penting dalam kepemimpinan, sifat-sifat tersebut adalah;

- a. Energik, untuk tercapainya kepemimpinan yang baik memang diperlukan energi yang baik pula, jasmani maupun rohani. Seorang pemimpin harus sanggup bekerja dalam jangka panjang dan dalam waktu yang tidak tertentu. Sewaktu-waktu dibutuhkan tenaganya, ia harus sanggup melaksanakannya mengingat kedudukannya dan fungsinya. Karena itu kesehatan fisik dan mental benar-benar diperlukan bagi seorang pemimpin.
- b. Memiliki stabilitas emosi, seorang pemimpin yang efektif harus melepaskan dari purbasangka, kecurigaan terhadap bawahan-bawahannya. Sebaliknya ia harus tegas, konsekuen dan konsisten dalam tindakan-tindakannya, percaya diri sendiri dan memiliki jiwa sosial terhadap bawahannya.
- c. Motivasi pribadi, keinginannya untuk memimpin harus datang dari dorongan batin pribadinya sendiri, dan bukan paksaan dari luar dirinya. Kekuatan dari luar hanya bersifat stimulus saja terhadap keinginan-keinginan untuk menjadi pemimpin. Hal tersebut tercermin dalam keteguhan pendiriannya, kemauan yang keras dalam bekerja dan penerapan sifat-sifat pribadi yang baik dalam pekerjaannya.
- d. Kemahiran mengadakan komunikasi, seorang pemimpin harus memiliki kemahiran dalam menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini sangat penting bagi pemimpin untuk mendorong maju

bawahan, memberikan atau menerima informasi bagi kemajuan organisasi dan kepentingan bersama.

- e. Kecakapan mengajar, sering kita dengar bahwa seorang pemimpin yang baik pada dasarnya adalah seorang guru yang baik. Mengajar adalah jalan yang terbaik untuk memajukan orang-orang atas pentingnya tugas-tugas yang dibebankan atau sebagainya.
- f. Kecakapan sosial, seorang pemimpin harus mengetahui benar tentang bawahannya. Ia harus mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dengan bawahan, sehingga mereka benar-benar memiliki kesetiaan bekerja di bawah kepemimpinannya.
- g. Kemampuan teknis, meskipun dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemimpinan seseorang, makin kurang diperlukan kemampuan teknis ini, karena lebih mengutamakan manajerial *skill*nya, namun sebenarnya kemampuan teknis ini diperlukan juga. Karena dengan dimilikinya kemampuan teknis ini seorang pemimpin akan lebih mudah dikoreksi bila terjadi suatu kesalahan pelaksanaan tugas.<sup>9</sup>

Dengan mengidentifikasi sifat-sifat kepemimpinan diatas tersebut tidak berarti bahwa seorang pemimpin yang baik harus memiliki keseluruhan atau semua sifat tersebut. Keseluruhan sifat tersebut hanyalah merupakan tipe ideal yang tidak mungkin terdapat di dalam kenyataan yang diharapkan tentunya ialah agar setiap pemimpin berusaha untuk memiliki sebanyak mungkin sifat kepemimpinan yang baik itu.

#### **4. Fungsi Kepemimpinan**

Menurut Usman Effendi fungsi kepemimpinan ialah memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi motivasi kerja, mengarahkan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, memberikan pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan

---

<sup>9</sup>Susilo Martoyo, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 184-186.

target dan perencanaan. Agar kelompok berjalan dengan efektif, pemimpin harus melaksanakan fungsi utama, yaitu;

- a. Fungsi yang berhubungan dengan tugas atau pemecahan masalah yaitu menyangkut pemberian saran penyelesaian, informasi dan pendapat.
- b. Fungsi-fungsi pemeliharaan kelompok atau sosial yaitu segala sesuatu yang dapat membantu kelompok berjalan lebih lancar persetujuan dengan kelompok lain, penengahan perbedaan kelompok dan sebagainya.<sup>10</sup>

Jadi dari pendapat tokoh diatas, menurut penulis seorang pemimpin harus mempunyai suatu kemampuan yang melekat pada dirinya untuk melakukan kewajibannya sebagai fungsi kepemimpinan penentu arah tujuan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi dengan pengawasannya sebagai fungsinya pemimpin untuk menghasilkan pengarahan, sosialisasi dalam sebulan sekali untuk meningkatkan kinerja yang baik, serta memberikan perintah dengan langsung dan memberikan kepercayaan dalam penyelesaian tugas, pimpinan juga memiliki sikap tegas dalam mengambil keputusan dan selalu mengajarkan nilai-nilai kesopanan seperti nasehat yang dilakukan secara langsung.

## 5. Peran Kepemimpinan

Menurut Miftah Thoha peran pemimpin itu dibagi kedalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Peran antar pribadi (*interpersonal role*), merupakan peran yang melibatkan orang dan kewajiban lain, yang bersifat seremonial dan simbolis. Peran ini meliputi peran sebagai figur untuk anak buah, pemimpin, dan penghubung.
- b. Peran informasional (*informational role*), meliputi peran pemimpin sebagai pemantau dan penyebar informasi, serta peran sebagai juru bicara.

---

<sup>10</sup>Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.188-189.

- c. Peran pengambilan keputusan (*decisional role*), yang termasuk dalam kelompok ini adalah peran sebagai seorang wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perunding.<sup>11</sup>

Sesuai dengan peran-peran tersebut, seorang pemimpin harus mampu mengelola organisasi. Apabila salah satu individu maupun kelompok mempunyai perbedaan pendapat yang kemudian menimbulkan suatu konflik, maka seorang pemimpin harus dapat mengatasi konflik dengan penuh kewibawaan tanpa memihak salah satu dari mereka yang sedang berkonflik sehingga masalah tersebut dapat segera berkurang atau teratasi dengan baik dan tidak ada yang merasa dirugikan.

## 6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemimpinan

Menurut Komang Ardana ada beberapa faktor tertentu yang dapat mempengaruhi proses kepemimpinan dalam suatu organisasi, faktor tersebut antara lain adalah;

- a. Karakteristik pribadi pemimpin, yang sangat menonjol adalah inteligensi. Umumnya pemimpin akan mempunyai taraf inteligensi yang lebih tinggi dari pada yang dipimpin. Selain itu ada karakteristik lain seperti kecerdasan dan memotivasi.
- b. Kelompok yang dipimpin, kumpulan dari pada karakteristik pribadi seorang pemimpin seperti yang diuraikan di atas itu belum berarti apa-apa, sebelum ia menggunakan sebagai alat untuk menginterpretasi tujuan yang harus dicapai olehnya.
- c. Situasi, setiap pemimpin akan berfungsi pada suatu situasi, yang berupa situasi manusia, fisik, dan waktu. Tiap-tiap perubahan situasi membutuhkan perubahan dalam macam kemampuan memimpin. Dengan pengertian bahwa setiap situasi adalah unik, maka untuk tiap situasi

---

<sup>11</sup>Miftah Thoha, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 12-19.

dibutuhkan pemimpin yang spesifik dan fleksibel untuk menghadapi situasi yang dahsyat.<sup>12</sup>

Dari teori tentang kepemimpinan diatas peneliti coba mengaplikasikan kedalam skripsi yang akan peneliti tulis, dimana dengan teori-teori tersebut apakah nantinya kepemimpinan *Imeum Mukim* Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan termasuk kedalam pemimpin yang ideal yang mampu mengayomi masyarakat dan melindungi masyarakat serta mampu menyelesaikan persoalan dan konflik-konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat nantinya.

## **B. Kepemimpinan dalam Perspektif Islam.**

### **1. Kriteria Kepemimpinan Islami**

Menurut Didin Hafidudin ada beberapa kriteria pemimpin sukses dalam sebuah organisasi. *Pertama*, ketika seorang pemimpin dicintai oleh bawahannya. Organisasi yang dipimpinnya akan berjalan dengan baik jika kepemimpinannya dinakhodai oleh pemimpin yang dicintai oleh bawahannya. Kriteria *Kedua* adalah pemimpin yang mampu menampung aspirasi bawahannya. Selain dicintai, pemimpin yang baik juga dapat menerima kritik dari bawahannya. Dalam hadis dikatakan;

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالْأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَدَقَ فِي إِنْ نَسِيَ ذِكْرَهُ وَ إِنْ ذَكَرَ  
أَعَانَهُ (رواه النسائي)

Artinya; “Jika Allah SWT. bermaksud menjadikan seorang pemimpin yang berhasil maka, Allah SWT. akan menjadikan para pembantunya itu orang-orang yang baik”. (HR. Nasa’i).

<sup>12</sup>Komang Ardana, Ni Wayan Mujiati dan Agung Ayu Sriathi, *Perilaku Organisasi, ....*, hlm. 106-107.

Yang dimaksud dengan para pembantunya adalah orang-orang yang baik, maka bawahan akan mendukungnya, namun jika seorang pemimpin melakukan tindakan yang tidak baik, maka bawahan akan mengoreksinya. Di sanalah pentingnya mekanisme *tausiyah*, mekanisme saling mengoreksi dan menasehati. Kriteria **Ketiga** adalah pemimpin yang selalu bermusyawarah. Seorang pemimpin selain harus siap menerima dan mendapatkan *tausiyah* atau kritikan, pemimpin yang sukses juga selalu bermusyawarah. Musyawarah ini ditunjukkan untuk saling bertukar pendapat dan pemikiran. Jika musyawarah berjalan dengan perusahaan dan kehidupan mereka. Dengan musyawarah, ada unsur penghargaan yang tersirat dari seorang pemimpin untuk menerima masukan-masukan dari para karyawan hal ini akan memberi dampak positif bagi berjalannya kepemimpinannya.<sup>13</sup>

## 2. Fungsi Kepemimpinan dalam Islam

Menurut Ahmad Ibrahim fungsi atau peranan kepemimpinan Islam jelas berbeda dengan fungsi kepemimpinan pada umumnya, berikut fungsi kepemimpinan dalam Islam adalah;

- a. Kepemimpinan dalam Islam bersifat pertengahan, selalu menjaga hak dan kewajiban individu serta masyarakat dalam prinsip keadilan, persamaan, tidak cenderung terhadap kekerasan dan kelembutan, tidak sewenang-wenang dan berbuat aniaya.
- b. Kepemimpinan yang konsen terhadap nilai-nilai kemanusiaan, memperhatikan kemuliaannya dan menyertakan dalam setiap persoalan krusial, memperlakukan dengan sebaik mungkin.

---

<sup>13</sup>Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), hlm. 119.

- c. Kepemimpinan yang konsen terhadap kehidupan rakyatnya, dan tidak membedakan mereka kecuali berdasarkan beban tanggung jawab seorang pemimpin.
- d. Kepemimpinan yang konsen terhadap tujuan dan memberikan kepuasan kepada bawahan dengan memberikan suri tauladan yang baik, konsisten dan tetap bersemangat serta rela berkorban untuk mewujudkan tujuan.
- e. Kepemimpinan yang memiliki kemampuan strategis, konsen terhadap faktor internal dan eksternal yang melingkupi organisasi dan perusahaan.<sup>14</sup>

### 3. Sifat Kepemimpinan Islam

Menurut Ma'ruf Abdullah bahwa seorang pemimpin yang beriman harus memiliki sifat-sifat yang mulia yang tertanam dalam jiwanya agar dapat menjadi pemimpin yang bisa dijadikan panutan untuk bawahannya, sifat-sifat tersebut antara lain adalah:

#### a. Akidah

Sebagai seorang pemimpin haruslah memiliki akidah yang baik apalagi dalam akidah sesuai Islam yang selalu mentaati dan menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, sehingga selalu bersih dari kebimbangan dan keranguan, sebagaimana firman Allah SWT:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

*Artinya: Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. (QS. An-Nisa: 30)*

Seorang muslim ketika memimpin, ia ingat bahwa Allah SWT. Adalah penciptanya. Ia memberikan kepadanya kemampuan-kemampuan untuk

---

<sup>14</sup>Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 155-156.

memimpin, maka sudah menjadi kewajiban untuk memimpin sesuai dengan perintah penciptanya, menuju tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh-nya sesuai dengan aturan-aturan dan batasan- batasan yang telah digariskan.

b. Ketaatan

Teladannya adalah Rasulullah SAW. Allah SWT. telah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul-Nya, jika kita benar- benar mencintai Allah SWT.

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ  
ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

*Artinya; “Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah SWT, ikutilah Aku, niscaya Allah SWT. mengasihi dan mengampuni dosadosa-mu.” Allah SWT. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Ali Imran: 31).*

Mengikuti sejarah hidup Rasulullah SAW. dan selalu berusaha untuk meneladani dan mengikuti beliau dalam semua urusan kehidupan karena itulah jalan untuk mencintai Allah SWT. juga karena beliau merupakan suri tauladan yang harus kita lalui.

c. Kebersihan hati

Pemimpin harus konsisten dalam setiap tindakannya. Ia merupakan panutan bagi yang lain. Konsisten berarti senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip dalam semua keadaan. Konsisten adalah semangat bekerja dan berkorban demi nilai kehidupan. Allah SWT. berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ .

Artinya; “*Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan Kami ialah Allah SWT.” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: “Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah SWT. kepadamu”*. (QS. Fushilat; 30).

d. Menunjukkan Sebagai Khalifah di bumi

Manusia diciptakan di bumi sebagai khalifah untuk mengatur segala apapun yang ada di bumi. Jika manusia mampu menjalankan itu semua maka sudah terpenuhi maka sunatullah rasulullah yang menjadikan manusia sebagai pemimpin di bumi dapat benar- benar dijalankan.<sup>15</sup> Sebagaiman firman Allah SWT:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ .

Artinya: *ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan memumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.* (QS. Al-Baqarah: 30)

<sup>15</sup>Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 41-49.

#### 4. Teladan Kepemimpinan dalam Islam

Kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan yang didasarkan hukum Allah SWT. Oleh karena itu, pemimpin haruslah orang yang paling tahu tentang hukum ilahi. Setelah para imam tiada, kepemimpinan haruslah dipegang para faqih yang mengerti syarat-syarat syari'at. sesungguhnya, dalam Islam figur pemimpin ideal menjadi contoh dan suri tauladan yang baik, bahkan menjadi rahmat bagi alam (*rahmatan lil'alam*) adalah Muhammad Rasulullah SAW, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah al Ahzab ayat 21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ  
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا .

*Artinya; "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah SWT. dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah SWT.". (Qs AlAhzab; 21).*

Rasulullah SAW dalam memimpin memiliki beberapa karakter utama yang bisa dijadikan tauladan untuk kepemimpinan saat ini. Beberapa karakter yang dimiliki Rasulullah SAW sebagai pemimpin adalah:

a. *Siddiq* (benar)

Segala perbuatan dan perkataan Nabi dan Rasul adalah benar, Seorang Nabi dan Rasul mustahil seorang pembohong. Karena setiap perkataan dan perbuatan mereka senantiasa dijaga oleh Allah SWT. Nabi dan Rasul bersifat benar baik dalam ucapan maupun tingkah laku perbuatannya. Seperti dalam QS Maryam ayat 41 yang berbunyi :

وَأذْكَرٌ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا .

*Artinya: Ceritakanlah (hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al kitab (Al Quran) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi. (QS Maryam:41)*

Surah tersebut merupakan bukti kebenaran dalam peristiwa ketika Nabi Ibrahim as berkata kepada ayahandanya merupakan perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh ayah beliau (Nabi Ibrahim) merupakan sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tentunya mudarat, jauhilah.

b. *Amanah* (dipercaya)

Nabi dan Rasul merupakan umat yang utusan Allah SWt yang diberikan amanah untuk menerima dan menyampaikan wahyu Allah. Hal tersebut terdapat dalam surah Q.S. asy-Syu'ara ayat 106-107 berikut ini:

إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ . إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ .

*Artinya: ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa. Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, (Q.S. Asy-Syu'ara: 106-107)*

Surah tersebut merupakan salah satu bukti ketika terdapat peristiwa pada saat kaum Nabi Nuh as mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh as. Dan Allah SWT, mengaskan bahwa Nabi Nuh as, merupakan orang yang terpercaya (amanah).

c. *Tabligh* (menyampaikan wahyu)

Rasul selalu menyampaikan wahyu kepada umat-Nya, tidak satupun ayat yang disembunyikan oleh Rasul kepada umat-Nya. Disebuah riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Talib ditanya tentang apa ada wahyu yang

tidak ada atau terdapat dalam al-Qur'an, beliau pun menegaskan bahwa "Demi Zat yang membelah biji dan melepas napas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seseorang terhadap al-Qur'an." Penjelasan ini terkait dengan Q.S. al-Maidah ayat 67 berikut ini.

يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.

*Artinya: Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia[430]. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (Q.S. Al-Maidah: 67)*

d. *Fathanah* (cerdas)

Dalam menyampaikan risalah Allah, tentu dibutuhkan kemampuan khusus agar wahyu yang tersimpan didalamnya hukum hukum Allah dan risalah yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh manusia. Karena itu, seorang rasul wajib memiliki sifat cerdas. Kecerdasan ini sangat berfungsi terutama dalam menghadapi orang-orang yang membangkang dan menolak ajaran Islam.

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ

*Artinya: Dan Itulah hujjah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. (al-An'am : 83)*

Seorang pemimpin yang profesional serta mengutamakan keahlian, kecerdasan, kebijaksanaan, kompetensi dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya.<sup>16</sup>

Kepemimpinan dari sudut agama Islam secara sederhana oleh setiap pemimpin harus dijalankan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menyeru agar orang lain di lingkungan masing-masing menjadi manusia beriman. Tugas dan kewajiban pemimpin tidaklah mudah, membutuhkan berbagai macam unsur yang mendukung terwujudnya kepemimpinan yang efektif serta mempunyai nilai mulia di sisi Allah SWT. Untuk memenuhi hal itu dibutuhkan seorang pemimpin yang menjunjung pada nilai-nilai kebenaran, dan seorang pemimpin yang penuh tanggung jawab, mempunyai loyalitas tinggi, cerdik dalam melihat peluang dan dapat menjaga amanah dengan baik.

Karakteristik kepemimpinan seperti yang diidealkan tersebut, hanya dapat ditemukan dalam pribadi Nabi Muhammad SAW, sebab kepemimpinan beliau berjalan diatas landasan spiritual yang paling tinggi dengan Allah SWT. langsung sebagai pembimbingnya. Di sini berarti pula bahwa ketaatan kepada Rasulullah saw. merupakan ketaatan kepada Allah SWT. Mengingat tujuan dari kepemimpinan beliau adalah mengajak beriman kepada Allah SWT. Untuk itu, segala perbuatan dan perkataan beliau dalam memimpin haruslah ditaati.

---

<sup>16</sup>Harahap Sofyan. S, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm.76

## C. Kepemimpinan Imeum Mukim

### 1. Pengertian Mukim

Mukim adalah Pemerintahan khas Aceh yang merupakan federasi dari beberapa *Gampong* (Desa) yang telah ada sejak Islam masuk ke Aceh. Pemerintahan mukim adalah pemerintahan yang tidak memisahkan urusan pemerintahan dari urusan masyarakat hukum adat dan agama. Secara Historis, Pemerintahan Mukim adalah suatu pemerintahan yang sudah ada pada masa kesultanan Aceh. Mengenai kaitannya dengan pemerintahan itu sendiri, menurut Ndraha pemerintahan adalah segala sesuatu yang dilakukan pemerintah. Pemerintah adalah aktor dan aktris pemerintahan.<sup>17</sup> Muhadam mengatakan bahwa pemerintahan sebagai ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya stukturstuktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik secara internal maupun eksternal.<sup>18</sup> Sementara itu pemerintahan umum dirumuskan sebagai keseluruhan struktur dan proses-proses yang melibatkan kebijaksanaan dan keputusan yang bersifat mengikat untuk dan atas nama kehidupan bersama. Mukim bagi Hurgroje bukanlah hasil bentukan atau ciptaan Pemerintah Hindia Belanda atau Pemerintah Indonesia melainkan hasil bentukan Pemerintah Aceh.<sup>19</sup> Irine berpendapat bahwa Mukim masih memiliki makna sebagai lembaga sosial yang di dalamnya terdiri dari struktur lembaga dengan individu-individu yang mempunyai posisi sosial dan mempunyai peran sosial, yaitu sebagai penjaga implementasi

---

<sup>17</sup>Taliziduhu Ndraha, *Kybernology Sebuah Charta Pembaruan*, (Banten: Sirao Credentia Center, 2005), hlm. 24.

<sup>18</sup>Muhadam Labolo, *Beberapa Pandangan Dasar Tentang Ilmu Pemerintahan*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 9.

<sup>19</sup>Snouck Hurgröje, *Aceh: Dimata Kolonialis*, Jilid. I, terj. Singaribun dkk, (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), hlm. 90.

syariat Islam. Mukim dalam pandangan administrasi pemerintahan berkedudukan diantara kecamatan dan gampong dan dari aspek relasi kelembagaan, Mukim berfungsi menjembatani gampong dengan kecamatan.<sup>20</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan mukim adalah pemerintahan yang tidak memisahkan urusan pemerintahan dari urusan masyarakat hukum adat dan agama. Mukim memiliki dasar yang kuat baik untuk pengaturan kehidupan sosial (adat) maupun untuk kehidupan beragama (*hukom*), dan juga kemudian pemerintahan. Dalam setiap melaksanakan tugas-tugas suatu organisasi itu sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang mendukung didalamnya. Ini juga berlaku pada Pemerintahan Mukim. Demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan mukim, maka dibentuk kelengkapan mukim yang terdiri dari Sekretariat Mukim, Majelis Musyawarah Mukim, Majelis Adat Mukim dan *Imeum Chik*.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Pasal 1 ayat (12) menjelaskan bahwa Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan/Sago Cut atau nama lain, yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain. Pada level Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah

---

<sup>20</sup>Irine H. Gayatri dan Septi Satriani, *Dinamika Kelembagaan Mukim: Era Otonomi Khusus Aceh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 7.

Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Pasal 1 ayat 19 dinyatakan bahwa mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh *imeum mukim* atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat. Selanjutnya pada Pasal 114 ayat (1), (2) dan (3) dinyatakan bahwa dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa gampong. Mukim dipimpin oleh *Imuem Mukim* sebagai penyelenggara tugas dan fungsi mukim dibantu oleh tuha peut mukim atau nama lain. *Imuem Mukim* dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 tahun.

Sementara *Qanun* Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Pada Pasal 2 menjelaskan bahwa mukim berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa gampong yang berada langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada camat. Pada Pasal 3 menjelaskan bahwa mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan syari'at Islam. Pada Pasal 4 dijelaskan bahwa Mukim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya;
- 2) Pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spritual;
- 3) Pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan Syari'at Islam, pendidikan,
- 4) peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat; Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;

- 5) Penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaanpersengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

Dalam pelaksanaan Pemerintahan Mukim, Mukim dipimpin oleh *Imuem Mukim* seperti dijelaskan pada *Qanun* Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan mukim. Dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa *Imuem Mukim* diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Walikota atas usulan Camat dari hasil pemilihan yang sah. Pemilihan *Imuem Mukim* dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh rakyat Mukim yang bersangkutan. Masa jabatan *Imuem Mukim* selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali periode untuk masa jabatan berikutnya.

## **2. *Imuem Mukim* sebagai pemimpin adat/ informal**

Imeum mukim sebagai pemimpin adat karena *Imuem Mukim* merupakan bagian dari lembaga adat. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 93 ayat (1) dijelaskan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh dan di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya pada Pasal 98 ayat (3) menyebutkan lembaga adat meliputi :

- a. Majelis adat Aceh;
- b. Imeum mukim atau nama lain;
- c. Imeum chik atau nama lain;
- d. Keuchik atau nama lain;
- e. Tuha Peuet atau nama lain;
- f. Tuha lapan atau nama lain;
- g. Imeum meunasah atau nama lain;

- h. Keujreun blang atau nama lain;
- i. Panglima laot atau nama lain;
- j. Pawang glee atau nama lain;
- k. Peutua seuneubok atau nama lain;
- l. Harian pekan atau nama lain;
- m. Syahbanda atau nama lain.

Selanjutnya indikator kepemimpinan *Imuem Mukim* secara adat/ informal sesuai dalam penelitian ini adalah:

- a. Menjadi hakim adat dalam penyelesaian persengketaan masyarakat
- b. Menjaga dan melestarikan adat
- c. Melindungi masyarakat di mukim

### **3. Imuem mukim Sebagai pemimpin pemerintahan/ formal**

*Imuem Mukim* mempunyai posisi yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan mukim. Salah satu kepemimpinan yang dijalankan *Imuem Mukim* antara lain sebagai pemimpin pemerintahan. Dalam *Qanun* Nomor 4 Tahun 2003 dan *Qanun* Aceh Selatan No 23 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim Pasal 3 jelas dinyatakan bahwa, Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam. Mukim sebagai penyelenggara pemerintahan secara eksplisit dalam *Qanun* tersebut menjelaskan bahwa keberadaannya telah mendapat pengakuan dan pengukuhannya dalam hukum positif Indonesia. Dengan demikian, keberadaannya tidak saja hanya diakui dalam tataran sosial budaya masyarakat Aceh, tetapi juga telah diadopsi kedalam tataran juridis formal. Sehingga, keberlakuan dan penegakan hukumnya telah mendapat dukungan kuat dari institusi resmi negara dan pemerintahan.

Menurut Afdhal menjelaskan bahwa Imeum Mukim di beberapa Mukim mengenakan pin kepemimpinan wilayah berlambang garuda, menandai representasi kekuasaan Negara. Imeum mukim menjadi pemimpin organisasi yang mengemban fungsi koordinasi atau membawahi organisasi teritori gampong, dalam pandangan banyak imeum, organisasi mukim dan gampong merupakan unit organisasi Negara.<sup>21</sup>

Berdasarkan *Qamun* dan teori tersebut menjelaskan bahwa *Imuem Mukim* adalah sebagai pemimpin pemerintahan/ formal. Selanjutnya Indikator Kepemimpinan *Imuem Mukim* secara pemerintahan/formal yang diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Pemimpin yang dipilih langsung
- b. Pemimpin pemerintahan mukim secara demokratis, transparan, partisipatif dan akuntabel.
- c. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syariat Islam
- d. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi
- e. Memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

*Imuem Mukim* yang dipilih langsung dan pemimpin pemerintahan secara demokratis, transparan partisipatif dan akuntabel dinyatakan sebagai berikut Berdasarkan *Qamun* Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 dan *Qamun* Aceh Selatan No 23 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim memang menjelaskan bahwa *Imuem Mukim* dipilih secara langsung oleh wakil masyarakat mukim melalui

---

<sup>21</sup>Afadlal, *Dinamika Kelembagaan Mukim Era Otonomi Khusus Aceh*, (Jakarta: Lipi Press, 2008), hlm. 212.

pemilihan yang demokratisasi, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.

#### **4. Tugas dan Fungsi Imeum Mukim**

Fungsi *Imeum Mukim* berdasarkan kedudukannya sebagai salah satu lembaga adat daerah di Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 98 Ayat (1) dan (2) tentang Pemerintahan Aceh adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Serta memiliki tugas yaitu menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan secara adat selaku salah satu lembaga adat, dan pada Ayat 4 menyebutkan mengenai tugas, kewajiban serta fungsi imeum mukim diatur pada *Qamun* kabupaten/kota.

Adapun penjelasan mengenai tugas dan fungsi *Imeum Mukim* lebih lanjut berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 *Qamun* Aceh Selatan No. 23 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim, yaitu:

##### **Pasal 3**

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at Islam.

##### **Pasal 4**

1. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Mukim;
2. Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan yang inklusif di Mukim;

3. Pembinaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama di kemukiman;
4. Pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di kemukiman;
5. Penyelesaian persengketaan adat di kemukiman; dan
6. Pengawasan pembangunan, fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kemukiman.

Dari penjelasan diatas menunjukkan regulasi serta pembagian tugas yang diserahkan Camat kepada Mukim serta yang menjadi tanggung jawab *Imeum Mukim* dalam pelaksanaan tugas selama masa jabatannya dan menjadi pedoman dalam bekerja.

#### **D. Konflik**

##### **1. Pengertian Konflik**

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat *inheren* artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial.

Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satu pun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan sebagainya. Dari setiap konflik ada beberapa diantaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan merupakan gejala

tidak dapat diatasinya akar konflik sehingga menimbulkan kekerasan dari model kekerasan yang terkecil hingga peperangan.

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan.<sup>22</sup> Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional.

Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya.<sup>23</sup>

Konflik artinya perkecokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan.<sup>24</sup> Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.<sup>25</sup>

Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup>Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

<sup>23</sup>Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 156.

<sup>24</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 587.

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 99.

<sup>26</sup>J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm 68.

Menurut Lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.<sup>27</sup>

Dari berbagai pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah percekocokan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. Konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan.

Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ketaraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.

---

<sup>27</sup>Robert Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1994), hlm. 53.

## 2. Bentuk-bentuk Konflik

Secara garis besar berbagai konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk konflik berikut ini:

### a. Berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif.

#### 1) Konflik destruktif

Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan lain sebagainya.

#### 2) Konflik konstruktif

Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi.<sup>28</sup>

### b. Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik

#### 1) Konflik vertikal

Merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.

#### 2) Konflik horizontal

Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa.

#### 3) Konflik diagonal

Merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Robert H. Lauer, *Perspective on Social Change: Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, terj. Alimandan S.U, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 98.

<sup>29</sup>Kusnadi, *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*, (Malang: Taroda, 2002), hlm. 67.

### 3) Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat.<sup>30</sup>

Ketidak merataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan asset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian asset sosial tersebut berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga menambahinya.

Beberapa sosiolog menjabarkan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik, diantaranya yaitu:

- a. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. Membinasakan disini tidak selalu diartikan sebagai pembinasakan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui. Di dalam realitas sosial tidak ada satu pun individu yang memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan pendapat, tujuan, keinginan tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial.<sup>31</sup>
- b. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula dikalangan khalayak kelompok yang luas. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa

<sup>30</sup>Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman, ...*, hlm 361.

<sup>31</sup>J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 68.

kelompoknya adalah yang paling baik. Jika masing-masing kelompok yang ada di dalam kehidupan sosial sama-sama memiliki sikap demikian, maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaan.<sup>32</sup>

- c. Perbedaan kepentingan. Mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana.<sup>33</sup>

Perbedaan pendirian, budaya, kepentingan, dan sebagainya tersebut diatas sering terjadi pada situasi-situasi perubahan sosial. Dengan demikian perubahan-perubahan sosial itu secara tidak langsung dapat dilihat sebagai penyebab juga terjadinya (peningkatan) konflik-konflik sosial. Perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat akan mengakibatkan berubahnya sistem nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dan perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat ini akan menyebabkan perbedaan-perbedaan pendirian dalam masyarakat.

#### **4) Dampak dari Adanya Konflik terhadap Masyarakat**

Tak perlu diragukan lagi, proses sosial yang namanya konflik itu adalah suatu proses yang bersifat disosiatif. Namun demikian, sekalipun sering berlangsung dengan keras dan tajam, proses-proses konflik itu sering pula mempunyai akibat-akibat yang positif bagi masyarakat. Konflik-konflik yang berlangsung dalam diskusi misalnya, jelas akan unggul, sedangkan pikiran-pikiran yang kurang terkaji secara benar akan tersisih. Positif atau tidaknya akibat konflik-konflik memang tergantung dari persoalan yang dipertentangkan, dan tergantung pula dari struktur sosial yang menjadi ajang berlangsungnya konflik. Oleh karena itu ada dua dampak dari adanya konflik terhadap masyarakat yaitu:

---

<sup>32</sup>J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar*, ..., hlm. 68.

<sup>33</sup>Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Bina Cipta, 2006), hlm. 70.

- a. Dampak positif dari adanya konflik
  - 1) Bertambahnya solidaritas intern dan rasa *in-group* suatu kelompok. Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas antar anggota di dalam masing-masing kelompok itu akan meningkat sekali. Solidaritas di dalam suatu kelompok, yang pada situasi normal sulit dikembangkan, akan langsung meningkat pesat saat terjadinya konflik dengan pihak-pihak luar.
  - 2) Konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat.<sup>34</sup>
- b. Dampak negatif dari adanya konflik
  - 1) Hancurnya kesatuan kelompok. Jika konflik yang tidak berhasil diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang, maka sudah barang tentu kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran.<sup>35</sup>
  - 2) Adanya perubahan kepribadian individu. Artinya, di dalam suatu kelompok yang mengalami konflik, maka seseorang atau sekelompok orang yang semula memiliki kepribadian pendiam, penyabar menjadi beringas, agresif dan mudah marah, lebih-lebih jika konflik tersebut berujung pada kekerasan.<sup>36</sup>
  - 3) Hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara nilai-nilai dan norma sosial dengan konflik terdapat hubungan yang bersifat korelasional, artinya bisa saja terjadi konflik berdampak pada hancurnya nilai-nilai dan norma sosial akibat ketidak patuhan anggota masyarakat akibat dari konflik.<sup>37</sup>

## 5) Upaya-upaya Untuk Mengatasi Konflik

Secara sosiologi, proses sosial dapat berbentuk proses sosial yang bersifat menggabungkan (*associative processes*) dan proses sosial yang menceraikan (*dissociative processes*). Proses sosial yang bersifat asosiatif diarahkan pada terwujudnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas. Sebaliknya proses sosial yang bersifat dissosiatif mengarah pada terciptanya nilai-nilai negatif atau asosial, seperti kebencian, permusuhan, egoisme, kesombongan,

---

<sup>34</sup>J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm 68.

<sup>35</sup>Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman*, ..., hlm 377.

<sup>36</sup>Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman*, ..., hlm 378.

<sup>37</sup>J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar*, ..., hlm 70.

pertentangan, perpecahan dan sebagainya. Jadi proses sosial asosiatif dapat dikatakan proses positif. Proses sosial yang dissosiatif disebut proses negatif. Sehubungan dengan hal ini, maka proses sosial yang asosiatif dapat digunakan sebagai usaha menyelesaikan konflik.<sup>38</sup>

Adapun bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yakni konsiliasi, mediasi, arbitrase, koersi (paksaan), *détente*. Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang mencari penyelesaian suatu masalah, yakni cara yang tidak formal lebih dahulu, kemudian cara yang formal, jika cara pertama membawa hasil.<sup>39</sup>

Menurut Nasikun, bentuk-bentuk pengendalian konflik ada enam yaitu:

- a. Konsiliasi (*conciliation*)  
Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan.
- b. Mediasi (*mediation*)  
Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka.
- c. Arbitrase berasal dari kata latin *arbitrium*, artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (*arbiter*) sebagai pengambil keputusan. Arbitrase berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi.
- d. Perwasitan, Di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.<sup>40</sup>

---

38Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 77.

39Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 22.

40Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, ..., hlm. 25.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Sepanjang pengetahuan, bahwa skripsi yang akan teliti ini belum ada yang menulis, tetapi terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang permasalahan yang ada kaitannya dengan penelitian yang diteliti ini.

Pertama skripsi yang ditulis oleh Muhajir Reza mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh berjudul *“Fungsi Tokoh Masyarakat Sebagai Pekerja Sosial Masyarakat Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga (Studi Pada Gampong Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara)”*, yang selesai tahun 2014. Adapun permasalahan dalam penelitiannya adalah bagaimana fungsi dan peran tokoh masyarakat sebagai pekerja sosial dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dan bagaimana konsep strategi serta kendala apa saja yang menghambat tokoh masyarakat sebagai pekerja social dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Dalam hasil dan kesimpulan dari penelitiannya tokoh masyarakat meunasah Beunot terlebih dahulu menyusun bagian penegakan fungsi dan peran kinerja dalam mengatasi konflik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), alur bagian penegakan fungsi dan peran tokoh masyarakat di mulai dari *Majeulis Ureng Tuha, Keuchik*, dan Imam serta tokoh adat, hukum, *Qamun* dan resam, kinerja yang dijalankan atas ketentuan adat, yaitu: Adatullah, Adat Mahkamah dan Adat Tunah, kinerja fungsi dan peran tokoh masyarakat dalam mengatasi konflik KDRT dijalankan dengan konsep strategi seperti memanggil dan menasehati. Dalam penelitian juga diketahui bahwa yang menjadi factor utama penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor utama

penyebab terjadinya KDRT adalah faktor keterbatasan ilmu yang sulit di damaikan, ekonomi dan faktor tersiksa dan terpaksa.<sup>41</sup>

Kedua skripsi yang ditulis oleh Heri Sardi mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh berjudul "*Peran Majelis Adat Dalam Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di Kecamatan Kluet Selatan*", yang selesai tahun 2010. Adapun permasalahan dalam penelitiannya adalah bagaimana peran dan fungsi adat dalam pandangan Islam serta peran MAA Kecamatan Kluet Selatan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan metode apa yang digunakan MAA Kecamatan Kluet Selatan dalam menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam hasil dan kesimpulan dari penelitiannya bahwa lembaga adat memiliki peranan penting dalam menyelesaikan masalah-masalah yang baru karena nash-nash syar'i tidak mencakup semua hal yang baru, MAA Kecamatan Kluet Selatan berperan dalam menyelesaikan sengketa, menjaga, menghidupkan dan mengkaji serta meningkatkan kualitas adat yang ada dalam masyarakat. Metode MAA Kecamatan Kluet Selatan adalah dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahan seperti Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Kepolisian, Muspika Kecamatan, sekolah-sekolah dan masyarakat setempat dalam mensosialisasikan kegiatan dan aturan-aturan adat, kerja sama ini dilandasi dengan sikap saling percaya, saling menghormati dan saling membagi informasi.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Muhajjir Reza, "*Fungsi Tokoh Masyarakat Sebagai Pekerja Sosial Masyarakat Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga (Studi Pada Gampong Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara)*", (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2014).

<sup>42</sup>Heri Sardi, "*Peran Majelis Adat Dalam Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di Kecamatan Kluet Selatan*", (Banda Aceh: Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry, 2010).

Selanjutnya hal yang membedakan skripsi ini dengan tulisan-tulisan yang lainnya adalah dalam skripsi ini peneliti ingin melihat peran *imeum mukim* dalam penyelesaian konflik antara masyarakat dan khususnya untuk penyelesain konflik Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan dengan yang membawahi 7 (tujuh) *gampong* yaitu *Gampong* Kedai Kandang, *Gampong* Luar, *Gampong* Ujung, *Gampong* Jua, *Gampong* Pisie Merapat, *Gampong* Ujung Pasir, dan *Gampong* Geulumbuk.<sup>1</sup>

#### **B. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya dari eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>2</sup> Metode penelitian kualitatif dapat digunakan pada lingkup yang paling kecil, yaitu satu situasi sosial (*single social situation*) sampai masyarakat yang luas yang kompleks.<sup>3</sup>

Salah satu karakteristik ilmu pengetahuan adalah selalu mengalami perkembangan. Salah satu cara untuk membuat perkembangan ilmu pengetahuan adalah dengan melakukan penelitian. Untuk mempermudah seseorang

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Statistik Kecamatan Kluet Selatan 2015*, (Aceh Selatan: BPS Aceh Selatan, 2015), hlm. 12.

<sup>2</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 1.

<sup>3</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, ..., hlm. 20.*

menemukan atau mencari hasil penelitian, maka dibuatlah pengelompokan sehingga memunculkan jenis-jenis penelitian yang dapat memudahkan bagi setiap peneliti untuk meneliti.<sup>4</sup>

Jenis penelitian dalam penulisan ini digolongkan kepada *field research* (penelitian lapangan) dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi untuk mencari data yang diperlukan. Untuk memperkuat analisis lapangan peneliti juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan penyelesaian konflik. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *juridis normatif*, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat benar atau salah berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

### C. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder

---

<sup>4</sup>Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 37.

<sup>5</sup>Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, (Bandung: Rimdi Press. 1995), hlm. 166.

adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>6</sup>

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan prosedur data sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>7</sup> Dalam hal ini penulis melaksanakan pengamatan terhadap kehidupan perkonomian, kehidupan sosial dan konflik yang terjadi dalam masyarakat di Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

##### 2. Interview

Interview yang sering disebut dengan wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini *interview* digunakan untuk menggali data tentang sejarah atau latar belakang berdirinya lembaga, letak geografis obyek penelitian. Selanjutnya dalam melakukan interview penulis menggunakan interview tak terstruktur. Artinya responden mendapat kebebasan dan kesempatan mengeluarkan buah pikiran, pandangan dan perasaannya tanpa diatur ketat oleh penulis. Dengan demikian sekalipun interview sudah terikat oleh pedoman wawancara (*interview guide*), tetapi pelaksanaannya tetap berlangsung secara harmonis, tidak terlalu formal dan wawancara berlangsung secara santai. Adapun informan yang di wawancari terdiri dari Camat satu orang, *Imeum Mukim* satu orang dan para *keuchik* tujuh orang dari 7 (tujuh) *gampong* di lingkungan Kemukiman Kandang.

---

<sup>6</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, ..., hlm. 137.

<sup>7</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, ..., hlm. 156.

<sup>8</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, ..., hlm. 155.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dimana data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada.<sup>9</sup> Di dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti mendapatkan data-data tertulis seperti dokumen-dokumen *imeum mukim* misalnya: Visi dan Misi, struktur organisasi, keadaan pengurus, keadaan sarana dan prasarana.

### E. Teknik Analisis Data

Analisa yang dimaksud adalah terhadap data yang telah diperoleh di lapangan dan terkumpul, kemudian diolah dengan cara mengklarifikasikan data tersebut ke dalam kategori tertentu. Untuk memahami dan mengkaitkan data memerlukan analisa.<sup>10</sup>

Dalam analisa ini penulis menggunakan deskriptif kualitatif dengan cara berpikir induktif. Dimana dalam analisa penulis menyajikan data dengan menggambarkan hasil penelitian tentang peran *imeum mukim* dalam menyelesaikan konflik antar warga masyarakat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dengan suatu teknik analisis yang lazim disebut *interactive model*. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen: 1). Reduksi data (*data reduction*), 2). Penyajian data (*data display*), 3). Penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*). Reduksi data (*data reduction*) bukan asal membuang data yang tidak diperlukan, melainkan merupakan upaya

---

<sup>9</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, ..., hlm. 158.

<sup>10</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 115.

yang dilakukan oleh peneliti selama analisis data dilakukan dan merupakan langkah yang tak terpisahkan dari analisis data.<sup>11</sup>

## **F. Instrumen Pengumpulan Data**

Instrumen penelitian menurut Suharsimi Arikunto adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian agar pekerjaannya menjadi lebih mudah dan baik, dalam arti lebih cermat, lengkap sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah.<sup>12</sup> Instrumen penelitian menurut Sugiyono adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.<sup>13</sup>

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa instrumen merupakan suatu alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam menggunakan metode pengumpulan data secara sistematis dan lebih mudah. Instrumen penelitian menempati posisi teramat penting dalam hal bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh data di lapangan, karena peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya.<sup>14</sup>

Adapun pedoman penelitian skripsi ini, penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

---

<sup>11</sup>Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), hlm. 104.

<sup>12</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 203.

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, ...*, hlm. 102.

<sup>14</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 168.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini merupakan laporan hasil penelitian tentang masalah yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Data yang terhimpun dalam bab ini merupakan hasil observasi terhadap kehidupan sosial masyarakat, interview wawancara dengan camat, *Imeum Mukim* dan para *Keuchik* di Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan serta beberapa dokumentasi sebagai penyedia informasi untuk kebutuhan penelitian. Selanjutnya peneliti akan menyajikan tentang hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan berpedoman kepada format wawancara yang telah disusun sebelumnya dan pengamatan langsung sebagai metode penelitian utama untuk mendeskripsikan dan membahas data yang telah diperoleh.

#### **A. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Kemukiman Kandang ini salah satu dari tiga kemukiman yang ada di Kecamatan Kluet Selatan. Kemukiman Kandang memiliki bentangan alam berupa persawahan, perkebunan dan perairan luas 1453.8384 Ha. Kemukiman Kandang memiliki tingkat kesuburan tanahnya sangat kurang. Sekitar 1212.8604 Ha masuk dalam kategori sedang dan 241.0080 Ha masuk dalam kategori tidak subur dan solum (kedalaman) tanah hanya antara 50-99 cm.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Syaiful Hilmi, SH Camat Kluet Selatan, (tanggal 19 Oktober 2017 pukul 09:36 WIB).

Posisi Kemukiman Kandang yang secara administratif berada di Kecamatan Kluet Selatan dibatasi oleh wilayah *Gampong-Gampong* tetangga dan sungai. *Gampong-Gampong* yang berbatasan dengan Kemukiman Kandang yaitu: sebelah utara berbatasan dengan *Gampong* Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara, sebelah selatan berbatasan dengan *Gampong* Sialang Kecamatan Kluet Selatan, sebelah barat berbatasan dengan sungai kluet, dan sebelah timur berbatasan dengan *Gampong* Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan. Berdasarkan data profil Kemukiman Kandang tahun 2015, Kemukiman Kandang tersebut memiliki jarak dan waktu tempuh ke ibu kota kecamatan memiliki jarak 9 km dengan waktu tempuh 20 menit dan jarak ke Ibukota Kabupaten 35 km dengan waktu tempuh 60 menit.

Masyarakat Kemukiman Kandang sebagian besarnya bekerja di sektor pertanian yakni pertanian padi, nelayan, dan petani lainnya. Sektor ini berjumlah 2.215 rumah tangga yang menggarap sekitar 998 ha persawahan yang tersebar di Kemukiman Kandang. Sedangkan sektor yang paling sedikit adalah sektor industri rumah tangga, yakni terdapat 113 rumah tangga yang bergerak di sektor tersebut. Selanjutnya tatanan kehidupan masyarakat Kluet Selatan sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, ditandai dengan kegiatan-kegiatan berbaur sosial kemasyarakatan sangat berjalan dan dipelihara. Mereka selalu melakukan suatu kegiatan yang menyangkut kepentingan umum secara bersama dan sukarela. Atas landasan inilah sehingga tumbuh motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik. Namun terkadang masih ada warga yang belum bisa menerima keputusan bersama, masing-masing masyarakat masih mempertahankan

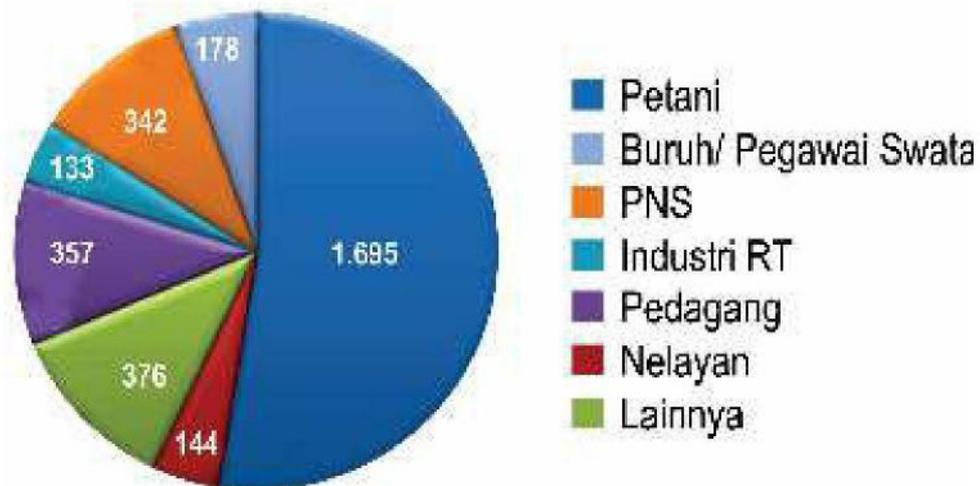
ide mereka sendiri. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan ilmu sehingga menyebabkan tingkat sosial budayanya rendah.<sup>2</sup>

Tabel Karakteristik *Gampong* di Kemukiman Kandang

No	<i>Gampong</i>	Desa	Desa Miskin		Jenis Desa
			Bukan Miskin	Miskin	
1	Kedai Kandang	Desa		Miskin	Swadaya <sup>3</sup>
2	<i>Gampong</i> Luar	Desa		Miskin	Swadaya
3	<i>Gampong</i> Ujung	Desa		Miskin	Swadaya
4	Jua	Desa		Miskin	Swadaya
5	Pisie Merapat	Desa		Miskin	Swadaya
6	Ujung Pasir	Desa		Miskin	Swadaya
7	Geulumbuk	Desa		Miskin	Swadaya

Sumber Dokumentasi Kecamatan Kluet Selatan Dalam Angka 2015

Jumlah Rumah Tangga Menurut *Gampong* dan Lapangan Usaha Utama Kepala Keluarga Tahun 2015



Sumber Dokumentasi Kecamatan Kluet Selatan Dalam Angka 2015

Jadi dari penjelasan diatas bisa dilihat bagaimana kehidupan perekonomian masyarakat Kemukiman Kandang masuk dalam kategori miskin, walaupun demikian kehidupan sosial masyarakat Kemukiman Kandang dapat

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Syaiful Hilmi, SH Camat Kluet Selatan, (tanggal 19 Oktober 2017 pukul 09:36 WIB).

<sup>3</sup>Desa Swadaya (desa terbelakang) yaitu desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa terbelakang berada di wilayah yang taraf kehidupannya miskin serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi.

dinilai masih memelihara nilai-nilai gotong royong, tolong-menolong, semangat kebersamaan, serta rasa kesatuan yang kuat masyarakat dan jika ada yang tidak melakukan atau menjaga hal tersebut akan mendapatkan sanksi dari masyarakat sekitar yang berupa celaan, gunjingan, dan lain-lain.

## **B. Bentuk-bentuk Konflik di Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan**

*Imeum Mukim* sebagai penyelesaian sengketa didalam masyarakat dan sebagai tokoh utama dalam pembuat keputusan dalam penyelesaian konflik yang terjadi, memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat karena setiap kata dan ucapan yang disampaikan *Imeum Mukim* didepan masyarakat menjadi pedoman didalam kehidupan sosial masyarakat tersebut, sehingga *Imeum Mukim* akan di hormati dan disegani dalam setiap pemutus perkara yang ada dimasyarakat. Sehingga pengambilan keputusan nantinya menjadi pemecahan masalah yang dihadapi, dapat diselesaikan dengan tegas dan memberikan setiap jawaban atas permasalahan dan tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Adapun mekanisme pengangkatan *Imeum Mukim* di sekecamatan Kluet Selatan mengacu kepada *Qamun Aceh Selatan* No. 23 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim yaitu dengan melalui pemilihan langsung, yang di delegasi tokoh-tokoh *Gampong* yang terdiri dari beberapa *Gampong* dan setiap *Gampong* di wakili (enam) orang. Dari perwakilan tersebut dipilihlah satu orang menjadi *Imeum Mukim* dan menjadi pemimpin adat, yang dipilih dari kalangan cerdik pandai atau pernuka masyarakat, namun pada jabatan *Imeum Mukim* masih melekat tanggung jawabnya dalam bidang keagamaan. Karena nantinya *Imeum*

*Mukim* mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at islam.<sup>4</sup>

Secara garis besar konflik dalam masyarakat di Kemukiman Kandang dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk yaitu:

1. Konflik destruktif yaitu merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain, diantaranya yaitu:
  - a. Masalah hutang piutang, konflik ini didasari oleh tidak adanya rasa tanggung jawab dari salah satu pihak yang terkait dengan transaksi hutang piutang yang dilakukannya.<sup>5</sup> Konflik ini terjadi antara dua warga *Gampong* Kedai Kandang pada tahun 2015 yaitu (A) warga *Gampong* Kedai Kandang dan Marwan warga *Gampong* Pasie Merapat.<sup>6</sup> Armiadi yang meminjamkan uang kepada (B) untuk kebutuhan rumah tangga, akan tetapi di waktu pengembalian yang sudah disepakati, (B) tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya dengan berbagai alasan kepada (A). Akibat dari itu semua terjadilah perselisihan sehingga terjadinya perkelahian.<sup>7</sup>
  - b. Konflik batas tanah, konflik batas tanah terjadi antara 2 (dua) orang pribadi yang memiliki bidang tanah yang saling bersinggungan yaitu (A) warga *Gampong* Ujung dengan (B) warga *Gampong* Luar yang terjadi pada tahun

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Syaiful Hilmi, SH Camat Kluet Selatan, (tanggal 19 Oktober 2017 pukul 09:36 WIB).

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Yasmizi *Imeum Mukim* Kandang, (tanggal 19 Oktober 2017 pukul 14:00 WIB).

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Nur Arman *Keuchik Gampong* Pasie Merapat, (tanggal 20 Oktober 2017 pukul 16:00 WIB).

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Bardi *Keuchik Gampong* Kedai Kandang, (tanggal 20 Oktober 2017 pukul 14:25 W113).

2015.<sup>8</sup> Konflik ini diawali oleh rasa tidak terima atas pemindahan batas tanah garapan kebun yang dilakukan secara sepihak oleh Darma.<sup>9</sup> Kendati demikian, konflik ini dapat diatasi dengan baik dengan memanggil para *Keuchik* kedua belah *Gampong* untuk melihat batas tanah mereka masing-masing sehingga diputuskanlah luas dan batas tanah mereka.<sup>10</sup>

- c. Konflik jual beli, konflik jual beli ini terjadi karena adanya ketidaksepakatan atas perjanjian transaksi jual beli yang dilakukan, baik itu terkait harga, garansi, maupun kualitas barang.<sup>11</sup> Ini terjadi pada tahun 2016 yaitu antara Junaidi warga *Gampong* Geulumbuk pemilik sorum sepeda motor bekas dengan (A) warga *Gampong* ujung pasir pembeli.<sup>12</sup> Konfliknya berupa perkelahian yang bermula dari percekocokan, dimana (A) merasa (B) culas, dengan memakaikan oli dengan tingkat kekentalan yang lebih tinggi supaya sepeda motor bekas waktu di tes suaranya lembut. Semua itu diketahui setelah (A) membawa sepeda motornya kebengkel setelah sebulan pemakaian.<sup>13</sup>
- d. Konflik harta warisan, Konflik ini terjadi karena adanya ketidakadilan yang dirasakan salah satu pihak, meskipun masih sama-sama saudara kandung konflik ini terjadi pada tahun 2015.<sup>14</sup> Tidak puasny atas pembagian harta warisan yang dilakukan oleh pihak keluarga, membuat terjadinya perkelahian antara dua saudara kandung.<sup>15</sup> Masuknya *Imeum Mukim*

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Juhardi *Keuchik Gampong* Ujung, (tanggal 20 Oktober 2017 pukul 08:45 WIB).

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Mukhlis *Keuchik Gampong* Luar, (tanggal 20 Oktober 2017 pukul 10:00 WIB).

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Nasrudin *Keuchik Gampong* Jua, (tanggal 23 Oktober 2017 pukul 09:00 WIB).

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Yasmizi *Imeum Mukim* Kandang, (tanggal 19 Oktober 2017 pukul 14:00 WIB).

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Hasli Murdi *Keuchik Gampong* Geulumbuk, (tanggal 23 Oktober 2017 pukul 11:00 WIB).

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Nur Arman *Keuchik Gampong* Pasie Merapat, (tanggal 20 Oktober 2017 pukul 16:00 WIB).

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Juhardi *Keuchik Gampong* Ujung, (tanggal 20 Oktober 2017 pukul 08:45 WIB).

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Mukhlis *Keuchik Gampong* Luar, (tanggal 20 Oktober 2017 pukul 10:00 WIB).

keranah ini dikarenakan kedua belah pihak berbeda domisili tempat tinggal yaitu warga *Gampong* Ujung dengan warga *Gampong* Luar.<sup>16</sup>

2. Konflik konstruktif yaitu Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan, diantaranya yaitu:
  - a. Konflik suporter bola (tarkam), konflik ini terjadi berawal dari turnamen sepak bola piala Mukim Kandang pada tahun 2017. Pertandingan waktu itu mempertemukan keseblasan *Gampong* Geulumbuk dengan keseblasan *Gampong* Ujung Pasir, perebutan bola antara pemain *Gampong* Geulumbuk dengan pemain *Gampong* Kedai Kandang dengan tekling keras membuat terjatuhnya pemain *Gampong* Ujung Pasir.<sup>17</sup> Tidak terimanya para pemain *Gampong* Geulumbuk atas insiden tersebut terjadilah kerusuhan antar pemain. Melihat hal tersebut superter masing-masing kelompok juga ikut serta menyerang para pemain dan para superter lainnya.<sup>18</sup>
  - b. Konflik penjualan batu/pasir sungai, konflik ini terjadi pada tahun 2015, akibat perbedaan harga jual pasir/batu sungai. Dimana persaingan harga untuk meraup untung dengan harga murah dan banyak pembelinya dan sering juga terjadi antara pemilik modal besar dengan masyarakat *Gampong* Ujung Pasir yang menggunakan sekop untuk mengisi mobil-mobil pengangkut batu/pasir.<sup>19</sup> Konflik berupa penahanan mobil beko oleh masyarakat dengan meminta pemilik modal untuk menghentikan pengerukan batu/pasir sungai menggunakan mobil beko.
  - c. Konflik perempuan, konflik ini terjadi pada tahun 2016 yang berawal dari perkecokan antara sepasang muda-mudi yang menjalin hubungan

---

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Yasmizi *Imeum Mukim Kandang*, (tanggal 19 Oktober 2017 pukul 14:00 WIB).

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Juhardi *Keuchik Gampong Ujung*, (tanggal 20 Oktober 2017 pukul 08:45 WIB).

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Jasman *Keuchik Gampong Ujung Pasir*, (tanggal 23 Oktober 2017 pukul 09:00 WIB).

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Jasman *Keuchik Gampong Ujung Pasir*, (tanggal 23 Oktober 2017 pukul 09:00 WIB).

percintaan, akibat percekocokan tersebut terjadilah tindak kekerasan terhadap perempuan.<sup>20</sup> Karena menjadi korban kekerasan, sang perempuan melaporkan kepada abangnya. Akibatnya membuat para pemuda *Gampong* geulumbuk marah dan mencari pelaku. Tidak ditemukannya pelaku dirumahnya membuat para pemuda melampiaskan kemarahannya dengan melakukan pengrusakan rumah pelaku.<sup>21</sup>

- d. Konflik perebutan lahan parkir, Konflik ini terjadi pada tahun 2016 dimana dipicu dari keinginan pemuda di wilayah *Gampong* Ujung Pasir untuk mengelola lahan parkir yang letaknya tepat di depan di ruko.<sup>22</sup> Namun keinginan itu terhalang oleh pengelola parkir yang telah menguasai lahan parkir tersebut terlebih dahulu. Sehingga konflik antara kedua kubu tak bisa terelakkan.<sup>23</sup>

Adapun *Gampong* yang rawan terjadi konflik adalah *Gampong* ujung pasir dan *Gampong* ini akibat dari kehidupan perekonomian masyarakatnya masih di bawah rata-rata dimana kebanyakan mata pencaharian masyarakat menjadi penjual batu/pasir sungai dan pekebun/petani.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat munculnya konflik dimasyarakat Kemukiman Kandang ini karena perbedaan antar perorangan/kelompok, sebab dalam menjalani sebuah pola interaksi sosial, tidak mungkin seseorang akan selalu sejalan dengan individu yang lain. Selain itu perbedaan dalam tataran individual, kebudayaan dalam masing-masing *Gampong* juga tidak sama. Setiap individu *Gampong* dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam

---

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan Hasli Murdi *Keuchik Gampong* Geulumbuk, (tanggal 23 Oktober 2017 pukul 11:00 WIB).

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan Yasmizi *Imeum Mukim Kandang*, (tanggal 19 Oktober 2017 pukul 14:00 WIB).

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan Jasman *Keuchik Gampong* Ujung Pasir, (tanggal 23 Oktober 2017 pukul 09:00 WIB).

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan Yasmizi *Imeum Mukim Kandang*, (tanggal 19 Oktober 2017 pukul 14:00 WIB).

lingkungan masyarakat *Gampong* yang samapun tidak menutup kemungkinan akan terjadi perbedaan kebudayaan, karena kebudayaan lingkungan keluarga yang membesarkannya tidak sama. Yang jelas, dalam tataran kebudayaan ini akan terjadi perbedaan nilai dan norma yang ada dalam lingkungan masyarakat.

### **C. Peran *Imeum Mukim Kandang* dalam Penyelesaian Konflik di Masyarakat**

Mukim telah memiliki peranan yang sangat penting dalam perjuangan revolusi kemerdekaan Aceh pada khususnya dan bangsa serta negara Indonesia pada umumnya, sehingga perlu diperkuat eksistensinya dalam struktur Pemerintahan Aceh sesuai dengan kedudukan dan kewenangan Mukim sebagai Pemerintahan Adat yang dibentuk melalui gabungan *Gampong*.

Mukim memiliki peranan yang bersifat sentral dalam sistem pemerintahan lokal Aceh yang meliputi peran administrasi pemerintahan, adat dan hukum. Dalam bidang administrasi, semua surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tanah dikeluarkan oleh Mukim atau disahkan oleh Mukim, setelah terlebih dahulu memeriksa status tanah yang diperjualbelikan melalui *Keuchik* atau lembaga adat lainnya sesuai dengan kedudukan tanah. Dalam bidang adat, Mukim merupakan rujukan dari setiap perkara adat yang belum dapat diselesaikan di tingkat *Gampong*. Mukim juga ikut mengatur kawasan bersama berupa padang meurabe, glee, blang, dan tanoh-tanoh yang berada di bawah penguasaan Mukim atau berada di luar penguasaan *Gampong*. Dalam bidang hukum, Mukim menjadi tempat penyelesaian hal-hal yang berhubungan dengan agama, seperti masalah

warisan, pernikahan, perceraian, pasakh dan rujuk, serta mengurus harta umat yang berada di bawah penguasaan Mukim.

Dalam urusan bidang kemasyarakatan *Imeum Mukim* Kandang memiliki peran yang sangat penting dalam membina hubungan kehidupan masyarakat. Untuk mempermudah dan memperlancar tugas dan kerja *Imeum Mukim* Kandang dalam mewujudkan tujuan tersebut, maka *Imeum Mukim* Kandang dibantu oleh unsur pemerintahan lainnya. Meskipun demikian sebagai manusia biasa *Imeum Mukim* Kandang tidak luput dari kekurangan dalam peranannya dalam menyelesaikan konflik yang ada.

Peran *Imeum Mukim* Kandang dalam menyelesaikan konflik antar warga *Gampong* masih dirasakan belum maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan. Untuk dapat mengatasi konflik-konflik yang ada dimasyarakat *Gampong*, *Imeum Mukim* Kandang harus melakukan mediasi dengan memberikan kesempatan kepada semua anggota kelompok untuk mengemukakan pendapatnya tentang kondisi-kondisi penting yang diinginkan, yang menurut persepsi masing-masing harus dipenuhi dengan pemanfaatan berbagai sumber daya dan dana yang tersedia. Meminta satu pihak menempatkan diri pada posisi orang lain, dan memberikan argumentasi kuat mengenai posisi tersebut. Kemudian posisi peran itu dibalik, pihak yang tadinya mengajukan argumentasi yang mendukung suatu gagasan seolah-olah menentangnya, dan sebaliknya pihak yang tadinya menentang satu gagasan seolah-olah mendukungnya. Setelah itu tiap-tiap pihak diberi kesempatan untuk melihat posisi orang lain dari sudut pandang pihak lain.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan para *Keuchik-Keuchik Gampong* yang berada dibawah Perintahan Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan:

1. Peran *Imeum Mukim* Kandang sebagai fasilitator sudah cukup efektif untuk dapat mempertemukan antar masyarakat yang bertikai, namun dari segi mediasi/mediator yang dilakukan *Imeum Mukim* Kandang dengan menunjuk orang lain sebagai mediator kurang efektif, dalam hal *Imeum Mukim* Kandang terkadang mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan umum. Sehingga akan memberikan pengaruh negatif bagi pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh *Imeum Mukim* Kandang dalam menjaga situasi dan kondisi yang aman, damai dan kondusif.<sup>24</sup>
2. Peran *Imeum Mukim* Kandang dalam beberapa masalah masyarakat sudah tidak sanggup dengan masalah ini yang setiap saat selalu terjadi. Dengan ketidak senangnya atau terjadinya konflik antar warga, akhirnya aktifitas maupun kerja sama antara warga menurun. Adanya kekecewaan masyarakat terhadap *Imeum Mukim* Kandang juga yang kurang memperhatikan masalah ini. Untuk itu harapan kami agar *Imeum Mukim* Kandang secepat mungkin supaya konflik yang ada secepatnya terselesaikan. Masyarakat juga sangat membutuhkan peran pemerintah mukim yang dimana sangat dibutuhkan dalam mempengaruhi dalam penyelesaian konflik.<sup>25</sup>
3. *Imeum Mukim* Kandang belum sadar dan menunjukkan perannya sebagai pelayan masyarakat, khususnya dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Akhirnya masyarakat menilai bahwa *Imeum Mukim* Kandang belum

---

<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan Juhardi *Keuchik Gampong* Ujung, (tanggal 20 Oktober 2017 pukul 08:45 WIB).

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan Mukhlis *Keuchik Gampong* Luar, (tanggal 20 Oktober 2017 pukul 10:00 WIB).

sepenuhnya melakukan perannya sesuai dengan visi dan misi maupun program yang telah disusun sebelumnya.<sup>26</sup>

4. *Imeum Mukim* Kandang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada. Bahkan tidak menjalankan perannya sesuai dengan Visi dan Misi dan aturan-aturan yang ada karena jika visi misi dan aturan sudah di jalankan, maka masyarakat akan merasa picas dengan apa yang diterapkan oleh kepala desa.<sup>27</sup>
5. Peran *Imeum Mukim* dalam menyelesaikan konflik dimasyarakat masih belum berperan maksimal, dimana tidak adanya langkah-langkah kongkrit atau upaya dalam menyelesaikan konflik, selama ini yang hanya dilakukan adalah musyawarah ditingkat *Gampong* dan terlihat seperti tidak adanya konsep yang serius dalam upaya menyelesaikan konflik.<sup>28</sup>
6. Jika tetap dibiarkan konflik dapat menjadi masalah yang serius dalam masyarakat, tanpa peduli apapun bentuk dan tingkat kompleksitas masyarakat tersebut. Konflik tersebut mungkin. tidak membawa “kematian” bagi masyarakat, tetapi pasti dapat menurunkan kinerja masyarakat dalam mencari nafkah, jika konflik tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian. Karena itu keahlian untuk mengelola konflik sangat diperlukan bagi setiap pimpinan atau *Imeum Mukim* khususnya *Imeum Mukim* Kandang.<sup>29</sup>

Fungsi *Imeum Mukim* berdasarkan kedudukannya sebagai salah satu lembaga adat daerah di Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 98 Ayat (1) dan (2) tentang Pemerintahan Aceh adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan

---

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan Bardi *Keuchik Gampong* Kedai Kandang, (tanggal 20 Oktober 2017 pukul 14:25 W113).

<sup>27</sup>Hasil wawancara dengan Nur Arman *Keuchik Gampong* Pasie Merapat, (tanggal 20 Oktober 2017 pukul 16:00 WIB).

<sup>28</sup>Hasil wawancara dengan Nasrudin *Keuchik Gampong* Jua, (tanggal 23 Oktober 2017 pukul 09:00 WIB).

<sup>29</sup>Hasil wawancara dengan Jasman *Keuchik Gampong* Ujung Pasir, (tanggal 23 Oktober 2017 pukul 09:00 WIB).

Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Serta memiliki tugas yaitu menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan secara adat selaku salah satu lembaga adat, dan pada Ayat 4 menyebutkan mengenai tugas, kewajiban serta fungsi *Imeum Mukim* diatur pada *Qanun* kabupaten/kota.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat dan tidak dipungkiri oleh *Imeum Mukim* Kandang ini semua akibat *Imeum Mukim* Kandang hanya sendiri, tidak memiliki atau dilengkapi struktural yang disokong oleh instrumen hukum, sehingga banyak peran fungsi dan peran daripada *Imeum Mukim* Kandang itu agak sedikit hilang, karena peraturan bupatilah yang akan menguatkan fungsi, peran serta kewenangan dari pemerintah mukim itu sendiri. Peraturan Bupatilah yang akan mengatur perlengkapan struktural perangkat pemerintah mukim yang selama ini hanya sebatas solo karir, terkadang ketika ada konflik terjadi *Imeum Mukim* Kandang berkoordinasi dengan lembaga-lembaga adat *Gampong* lainnya seperti tuba peut, tengku imum, *Keuchik* dan lembaga lainnya.

#### **D. Cara *Imeum Mukim* dalam Menyelesaikan Konflik di Masyarakat**

Ada beberapa tahap yang dilakukan oleh *Imeum Mukim* Kandang dalam menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat. Untuk tahapan awal yang dilakukan oleh *Imeum Mukim* Kandang dalam menyelesaikan konflik setelah adanya laporan dari para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa kepada *Imeum Mukim* Kandang, selanjutnya *Imeum Mukim* Kandang menganalisis terlebih dahulu kasus itu, apakah kasus ini dapat diselesaikan oleh *Imeum Mukim* Kandang sendiri atautkah perlu dibantu oleh lembaga adat lainnya. Apabila kasus

sengketa ini di anggap kasus yang ringan maka kasus sengketa ini akan diselesaikan ditingkat *Keuchik*. Akan tetapi jika kasus sengketa/konflik yang dilaporkan itu termasuk dalam kategori kasus berat maka *Keuchik* akan mendiskusikan terlebih dahulu kasus tersebut dengan unsur lembaga adat lainnya. Dalam hal ini *Keuchik* akan mengajak imeum meunasah atau tuba peut untuk mendiskusikan kasus yang ada selanjut akan melimpahkan kelembaga mukim.<sup>30</sup>

Tahapan selanjutnya adalah *Imeum Mukim* Kandang mendatangi para pihak secara terpisah untuk mengetahui akar permasalahan yang menimbulkan konflik. Selain itu *Imeum Mukim* Kandang juga menanyakan kesediaan dari para pihak untuk berdamai. Setelah *Imeum Mukim* Kandang menganalisis permasalahan yang terjadi maka *Imeum Mukim* lainnya mengundang para pihak yang berkonflik untuk bertemu dalam satu tempat pertemuan. Akan tetapi ada juga kebijakan yang diambil oleh *Imeum Mukim* Kandang untuk tidak mempertemukan para pihak secara langsung pada suatu tempat. Pertemuan antara para pihak yang berkonflik biasanya dilakukan di masjid atau meunasah dan biasanya dihadiri oleh *Keuchik*, imeum meunasah, ketua tuha peut, selcretaris desa, dan para pihak yang berkonflik. Akan tetapi untuk kasus-kasus tertentu pertemuan tidak dilakukan di tempat terbuka. Seperti, penyelesaian kasus KDRT yang mengambil lokasi bukan di tempat umum atau fasilitas publik. Biasanya tempat pertemuan untuk kasus KDRT mengambil tempat di rumah *Keuchik*; kantor desa, atau tempat lainnya yang disepakati oleh para pihak. Adakalanya penyelesaian kasus juga dilakukan di tempat-tempat lain, misalnya di sawah,

---

<sup>30</sup>Hasil wawancara dengan Yasmizi *Imeum Mukim* Kandang, (tanggal 19 Oktober 2017 pukul 14:00 WIB).

lapangan bola, waning kopi atau tempat mana saja yang memungkinkan untuk dilakukan diskusi. Walaupun penyelesaian kasus pada tempat-tempat ini lebih terkesan informal tetapi dampak yang dihasilkan terkadang lebih berpengaruh ketimbang penyelesaian yang dilakukan secara formal.<sup>31</sup>

Ada beberapa macam mekanisme pertemuan penyelesaian konflik yang berlaku dalam Kemukiman Kandang. Bentuk-bentuk mekanisme pertemuan penyelesaian konflik adalah sebagai berikut:

1. *Imeum Mukim* Kandang bertugas sebagai pimpinan dalam pertemuan tersebut. Setelah *Keuchik* membuka acara tersebut kemudian mempersilakan *Imeum Mukim* Kandang untuk memberi nasihat kepada para pihak. Dalam pertemuan tersebut para pihak hanya mendengarkan nasihat dan solusi yang telah dibuat oleh *Imeum Mukim* Kandang. Para pihak tidak diberikan lagi kesempatan untuk tanya-jawab karena dikhawatirkan akan terjadi perdebatan. Setelah mendengarkan nasihat dan keputusan dari *Imeum Mukim* Kandang, para pihak dipersilakan untuk berjabat tangan sambil meminta maaf secara lisan. Kemudian acara dilanjutkan dengan penandatanganan surat pernyataan perdamaian yang telah ditulis diatas kertas. Dalam hal ini *Imeum Mukim* Kandang meminta para pihak untuk menandatangani surat tersebut di atas materai dan juga meminta tanda tangan *Keuchik*, imeum meunasah, ketua tuha peut dan sekretaris desa sebagai saksi.<sup>32</sup>
2. *Imeum Mukim* Kandang bertugas sebagai orang yang memfasilitasi dan bertanggung jawab terhadap jalannya pertemuan tersebut. Setelah *Imeum Mukim* Kandang membuka pertemuan tersebut, kemudian mempersilakan pihak penggugat dan tergugat untuk menyampaikan keinginan dan harapan mereka terhadap permasalahan yang ada. Selanjutnya untuk kasus-kasus

---

<sup>31</sup>Hasil wawancara dengan Yasmizi *Imeum Mukim* Kandang, (tanggal 19 Oktober 2017 pukul 14:00 WIB).

<sup>32</sup>Hasil wawancara dengan Yasmizi *Imeum Mukim* Kandang, (tanggal 19 Oktober 2017 pukul 14:00 WIB).

tertentu, seperti kasus sengketa tanah, *Keuchik* akan memberikan kesempatan pada teungku imeum untuk memaparkan tentang aturan-aturan pembagian hak pakai tanah. Kemudian biasanya akan ada penolakan atau info-info Baru yang muncul dari para pihak tentang masalah yang akan diselesaikan. Setelah itu pihak *Keuchik* antara dua *Gampong* berusaha untuk memfasilitasi tercapainya suatu keputusan yang disepakati secara bersama-sama. Selanjutnya keputusan yang telah disepakati itu ditulis dan kemudian ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi yang turut dalam pertemuan itu. Biasanya saksi-saksi dalam pertemuan ini adalah bagian dari unsur lembaga adat. Namun jika ada dari para pihak yang tidak setuju dengan keputusan yang telah diambil maim kasus tersebut tidak lagi menjadi kewenangan *Imeum Mukim Kandang* untuk menyelesaikannya.

3. *Imeum Mukim Kandang* bertugas sebagai pemimpin dalam pertemuan itu. Setelah *Imeum Mukim Kandang* membuka pertemuan kemudian tahap selanjutnya adalah mendengarkan pemaparan masalah dari kedua belah pihak. Tahap selanjutnya *Imeum Mukim Kandang* memberi kesempatan kepada para hadirin untuk memberi masukan dan saran terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para pihak. Kemudian *Imeum Mukim Kandang* memberikan nasihat dan tawaran solusi kepada para pihak. Apabila tawaran solusi diterima oleh kedua belch pihak, maka konflik dianggap telah berhasil diselesaikan. Mengenai surat pernyataan basil kesepakatan bersama biasanya dibuat apabila para pihak memintanya dan surat itu ditandatangani oleh *Keuchik*, tuha peut, dan para pihak yang ber-konflik/bersengketa. Apabila para pihak tidak setuju dengan tawaran penyelesaian maka kasus ini dianggap belum selesai dan para pihak boleh mencari penyelesaian dengan cara lain, yaitu dengan mengajukan permasalahan itu ke pihak kepolisian.<sup>33</sup>

Penyelesaian tanpa vonis dengan berdasarkan kesepakatan dari beberapa elemen masyarakat seperti *tuha peut*, tokoh pemuda, teungku imum, *keucik* serta

---

<sup>33</sup>Hasil wawancara dengan Yasmizi *Imeum Mukim Kandang*, (tanggal 19 Oktober 2017 pukul 14:00 WIB).

pihak yang berkonflik. Hal ini dilakukan agar tidak ada yang merasa di rugikan dan dibedakan.<sup>34</sup> Diberinya wewenang kepada *Imeum Mukim* Kandang untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mempercayai saya dalam urusan penyelesaian masalah. Di dalam pengadilan adat, mukim berperan sebagai pemimpin sidang dalam hal penyelesaian masalah (peradilan adat) dengan diberikannya kekuasaan dan wewenang dalam menyelesaikan konflik berdasarkan adat terlebih dahulu demi menghargai hukum adat dan keistimewaan Aceh, serta koordinasi yang baik dengan baik.

---

<sup>34</sup>Hasil wawancara dengan Yasmizi *Imeum Mukim* Kandang, (tanggal 19 Oktober 2017 pukul 14:00 WIB).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afadlal, *Dinamika Kelembagaan Mukim Era Otonomi Khusus Aceh*, (Jakarta: Lipi Press, 2008).
- Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Bina Cipta, 2006).
- Brantas, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Statistik Kecamatan Kluet Selatan 2015*, (Aceh Selatan: BPS Aceh Selatan, 2015).
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003).
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, (Bandung: Rimdi Press. 1995).
- Harahap Sofyan. S, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011).
- Hamzah Zakub, *Menuju Keberhasilan, Manajemen dan Kepemimpinan*, (Bandung: Diponegoro, 2010).
- Irine H. Gayatri dan Septi Satriani, *Dinamika Kelembagaan Mukim: Era Otonomi Khusus Aceh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998).
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

- Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Mukhlis, *Perkembangan Mukim di Aceh*, Jurnal Nanggroe Volume 4 Nomor 2 (Agustus 2015).
- M. Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012).
- Miftah Thoha, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Muhadam Labolo, *Beberapa Pandangan Dasar Tentang Ilmu Pemerintahan*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008).
- Nasharuddin Baidan dan Erwati Aziz, *Etika Islam dalam Berbisnis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
- Richard L. Daft, *Manajemen*, terj. Emil Salim dan Iman Karmawan, (Jakarta: Erlangga, 2003).
- Ricky W. Griffin, *Manajemen*, terj. Gina Gania, (Jakarta: Erlangga, 2003).
- Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi*, terj. Tim Indeks, (Jakarta: Indeks, 2003).
- Snouck Hurgronje, *Aceh: Dimata Kolonialis*, Jilid. I, terj. Singaribun dkk, (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985).
- Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).
- Susilo Martoyo, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, (Yogyakarta: BPFE, 2000).

- Taliziduhu Ndraha, *Kybernology Sebuah Charta Pembaruan*, (Banten: Sirao Credentia Center, 2005).
- Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Robert Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1994).
- Robert H. Lauer, *Perspective on Social Change: Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, terj. Alimandan S.U, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Kusnadi, *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*, (Malang: Taroda, 2002).
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Statistik Kecamatan Kluet Selatan 2015*, (Aceh Selatan: BPS Aceh Selatan, 2015).
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Lkis, 2007).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).
- Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

## **B. Hasil Penelitian/Jurnal/Skripsi**

- Heri Sardi, “*Peran Majelis Adat Dalam Menegakkan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar di Kecamatan Kluet Selatan*”, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry, 2010).
- Muhajjir Reza, “*Fungsi Tokoh Masyarakat Sebagai Pekerja Sosial Masyarakat Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga (Studi Pada Gampong Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara)*”, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2014).

## **C. Perundang-undangan/Qanun**

- Qanun Aceh Selatan No 23 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

**D. Kamus**

Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992).

**Daftar Pertanyaan Penelitian Skripsi Dengan Judul**  
**“Peran Imeum Mukim dalam Menyelesaikan Konflik**  
(Studi Kasus Konflik Antar Warga Masyarakat Kemukiman Kandang  
Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)”

**Pedoman Wawancara untuk Camat Kecamatan Kluet Selatan**

1. Bagaimana kondisi kultur budaya dan sosial masyarakat Kecamatan Kluet Selatan ?
2. Bagaimana taraf ekonomi masyarakat di Kecamatan Kluet Selatan?  
Apakah ada yang hidup sebagai keluarga sejahtera?
3. Bagaimana mekanisme pengangkatan seorang Imeum Mukim Kecamatan Kluet Selatan
4. Bagaimana kedudukan Imeum Mukim dalam sistem pemerintahan di Kecamatan Kluet Selatan?
5. Bagaimana peran Imeum Mukim sesuai Qanun?
6. Apakah kedudukan Mukim sudah seperti yang diharapkan oleh lingkungan sosial ?
7. Bagaimana peran Imeum Mukim dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat?
8. Konflik apa saja yang rentan terjadi di masyarakat Kecamatan Kluet Selatan?
9. Desa mana saja di Kecamatan Kluet Selatan yang rawan terjadi konflik?

### **Pedoman Wawancara untuk Mukim Kandang**

1. Apakah menurut bapak posisi kedudukan Mukim yang ada saat ini sudah sesuai dengan tujuan keberadaan Mukim itu sendiri?
2. Bagaimana bapak menjalankan roda Pemerintahan Mukim di bawah kepemimpinan bapak?
3. Bagaimana bapak menyelesaikan konflik yang muncul dimasyarakat?
4. Konflik apa saja yang rentan terjadi di masyarakat Kemukiman Kandang?
5. Desa mana saja di Kemukiman Kandang yang rawan terjadi konflik?

### **Pedoman Wawancara untuk Tokoh Masyarakat**

1. Apakah menurut bapak posisi kedudukan Mukim yang ada saat ini sudah sesuai dengan tujuan keberadaan Mukim itu sendiri?
2. Apakah bapak merasa keberadaan Mukim tersebut sebagai lembaga yang membantu masyarakat?
1. Bagaimana efektifitas keberadaan mukim dalam penyelesaian masalah antar masyarakat?
2. Desa mana saja di Kemukiman Kandang yang rawan terjadi konflik?
3. Konflik apa saja yang rentan terjadi di masyarakat Kemukiman Kandang?
4. Bagaiman Peran Imeum Mukim Kandang dalam Penyelesaian Konflik di Masyarakat?
5. Metode atau cara Imeum Mukim dalam Menyelesaikan Konflik di Masyarakat Kandang?

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: Un.08/FDK/KP.00.4/5151/2016

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2017, Tanggal 7 Desember 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Juhari, M. Si. (Sebagai Pembimbing Utama)  
2). Raihan, S.Sos.I, MA. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:  
Nama : Dodi Sanival.  
NIM/Jurusan : 431307358/Manajemen Dakwah (MD).  
Judul : Peran Imeum Mukim dalam Menyelesaikan Konflik: Studi Kasus Antar Warga Masyarakat di Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 30 Desember 2016 M.

30 Rabiul Awal 1438 H.

Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dekan



Dr. Kusnawati Hatta, M. Pd.  
NIP. 19641220 198412 2001.

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

**Keterangan:**

SK berlaku sampai dengan tanggal: **30 Desember 2018.**



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
**KECAMATAN KLUET SELATAN**

Jalan T. Tjoet Ali No... Telp... Fax...  
SUAQ BAKUNG – KODE POS 23772

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/23/X/2017

1. Sehubungan dengan surat dari Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Nomor: B.3550/Un.08/FDK.I/PP.00.9/10/2017, tanggal 17 Oktober 2017 perihal Mohon Bantuan dan Keizinan Mengumpulkan Data Skripsi di wilayah Kecamatan Kluet Selatan menerangkan bahwa benar yang namanya tersebut di bawah ini akan melakukan pengumpulan Data/penelitian di Kecamatan Kluet Selatan untuk kepentingan penyusunan Skripsi dengan judul *“Peran Imum Mukim dalam Menyelesaikan Konflik : Studi Kasus Antar Warga Masyarakat di Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.”*

Nama/Instansi : Dodi Sanival/UIN Ar-Raniry  
NIM : 431307358  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Semester : Ganjil  
Alamat : Baet

2. Demikian Surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Di keluarkan : Suaq Bakung

Pada Tanggal : 23 Oktober 2017





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
KECAMATAN KLUET SELATAN  
IMEUM MUKIM KANDANG  
KEDAI KANDANG – KODE POS 23772

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor: 470/68/X/2017

1. Sehubungan dengan surat dari Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry Nomor : B.3550/Un.08/FDK.I/PP.00.9/10/2017, Tanggal 17 Oktober 2017 perihal Mohon bantuan Keizinan Mengumpulkan Data Skripsi di wilayah Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan. Menerangkan bahwa benar yang namanya dibawah ini akan melakukan pengumpulan data/penelitian di Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan untuk kepentingan penyusunan Skripsi dengan judul ***“Peran Imeum Mukim dalam Menyelesaikan Konflik : Studi Kasus Antar Warga Masyarakat di Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.”***

Nama/Instansi	: Dodi Sanival/UIN Ar-Raniry
Nim	: 431307358
Prodi/Fakultas	: Manajemen Dakwah/Dakwah
Semester	: Ganjil
Alamat Sekarang	: Bait

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Di keluarkan : Kedai Kandang  
Pada tanggal : 24 Oktober 2017  
IMEUM MUKIM KANDANG.





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
KECAMATAN KLUET SELATAN  
KEUCHIK KEDAI KANDANG  
KEDAI KANDANG – KODE POS 23772

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor 478/X/2017

1. Sehubungan dengan surat dari Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry Nomor : B.3550/Un.08/FDK.1/PP.00.9/10/2017, Tanggal 17 Oktober 2017 perihal Mohon bantuan Keizinan Mengumpulkan Data Skripsi di wilayah Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan. Menerangkan bahwa benar yang namanya dibawah ini akan melakukan pengumpulan data/penelitian di Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan untuk kepentingan penyusunan Skripsi dengan judul *"Peran Imeum Mukim dalam Menyelesaikan Konflik : Studi Kasus Antar Warga Masyarakat di Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan."*

Nama/Instansi	: Dodi Sanival/UIN Ar-Raniry
Nim	: 431307358
Prodi/Fakultas	: Manajemen Dakwah/Dakwah
Semester	: Ganjil
Alamat Sekarang	: Bait

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Di keluaran : Kedai Kandang

Pada tanggal : 24 Oktober 2017

KEUCHIK KEDAI KANDANG,





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
KECAMATAN KLUET SELATAN  
KEUCHIK DESA JUA  
DESA JUA – KODE POS 23772

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor: 109/X/2017

1. Sehubungan dengan surat dari Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry Nomor : B.3550/Un.08/FDK.I/PP.00.9/10/2017, Tanggal 17 Oktober 2017 perihal Mohon bantuan Keizinan Mengumpulkan Data Skripsi di wilayah Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan. Menerangkan bahwa benar yang namanya dibawah ini akan melakukan pengumpulan data/penelitian di Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan untuk kepentingan penyusunan Skripsi dengan judul ***“Peran Imeum Mukim dalam Menyelesaikan Konflik : Studi Kasus Antar Warga Masyarakat di Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.”***

Nama/Instansi	: Dodi Sanival/UIN Ar-Raniry
Nim	: 431307358
Prodi/Fakultas	: Manajemen Dakwah/Dakwah
Semester	: Ganjil
Alamat Sekarang	: Bait

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Di keluaran : Desa Jua  
Pada tanggal : 24 Oktober 2017  
KEUCHIK DESA JUA,

  
NASRUDIN



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
KECAMATAN KLUET SELATAN  
KEUCHIK DESA LUAR  
DESA LUAR – KODE POS 23772

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor: / /X/2017

1. Sehubungan dengan surat dari Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry Nomor : B.3550/Un.08/FDK.I/PP.00.9/10/2017, Tanggal 17 Oktober 2017 perihal Mohon bantuan Keizinan Mengumpulkan Data Skripsi di wilayah Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan. Menerangkan bahwa benar yang namanya dibawah ini akan melakukan pengumpulan data/penelitian di Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan untuk kepentingan penyusunan Skripsi dengan judul ***“Peran Imeum Mukim dalam Menyelesaikan Konflik : Studi Kasus Antar Warga Masyarakat di Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.”***

Nama/Instansi : Dodi Sanival/UIN Ar-Raniry  
Nim : 431307358  
Prodi/Fakultas : Manajemen Dakwah/Dakwah  
Semester : Ganjil  
Alamat Sekarang : Bait

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Di keluarkan : Desa Luar  
Pada tanggal : 2 November 2017  
KEUCHIK DESA LUAR,



MUKLIS



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
KECAMATAN KLUET SELATAN  
KEUCHIK DESA UJUNG  
DESA UJUNG – KODE POS 23772

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor: *B9X*/2017

1. Sehubungan dengan surat dari Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry Nomor : B.3550/Un.08/FDK.I/PP.00.9/10/2017, Tanggal 17 Oktober 2017 perihal Mohon bantuan Keizinan Mengumpulkan Data Skripsi di wilayah Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan. Menerangkan bahwa benar yang namanya dibawah ini akan melakukan pengumpulan data/penelitian di Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan untuk kepentingan penyusunan Skripsi dengan judul ***“Peran Imeum Mukim dalam Menyelesaikan Konflik : Studi Kasus Antar Warga Masyarakat di Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.”***

Nama/Instansi	: Dodi Sanival/UIN Ar-Raniry
Nim	: 431307358
Prodi/Fakultas	: Manajemen Dakwah/Dakwah
Semester	: Ganjil
Alamat Sekarang	: Bait

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Di keluarkan : Desa Ujung  
Pada tanggal : 2 November 2017  
KEUCHIK DESA UJUNG,





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
KECAMATAN KLUET SELATAN  
KEUCHIK DESA PASIR MERAPAT  
DESA PASIR MERAPAT – KODE POS 23772

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor: / /X/2017

1. Sehubungan dengan surat dari Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry Nomor : B.3550/Un.08/FDK.I/PP.00.9/10/2017, Tanggal 17 Oktober 2017 perihal Mohon bantuan Keizinan Mengumpulkan Data Skripsi di wilayah Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan. Menerangkan bahwa benar yang namanya dibawah ini akan melakukan pengumpulan data/penelitian di Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan untuk kepentingan penyusunan Skripsi dengan judul ***“Peran Imeum Mukim dalam Menyelesaikan Konflik : Studi Kasus Antar Warga Masyarakat di Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.”***

Nama/Instansi	: Dodi Sanival/UIN Ar-Raniry
Nim	: 431307358
Prodi/Fakultas	: Manajemen Dakwah/Dakwah
Semester	: Ganjil
Alamat Sekarang	: Bait

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Di keluarkan : Desa Pasir Merapat  
Pada tanggal : 2 November 2017  
KEUCHIK DESA PASIR MERAPAT,





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
KECAMATAN KLUET SELATAN  
KEUCHIK DESA PASIR MERAPAT  
DESA PASIR MERAPAT – KODE POS 23772

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor: / IX/2017

1. Sehubungan dengan surat dari Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry Nomor : B.3550/Un.08/FDK.I/PP.00.9/10/2017, Tanggal 17 Oktober 2017 perihal Mohon bantuan Keizinan Mengumpulkan Data Skripsi di wilayah Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan. Menerangkan bahwa benar yang namanya dibawah ini akan melakukan pengumpulan data/penelitian di Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan untuk kepentingan penyusunan Skripsi dengan judul ***“Peran Imeum Mukim dalam Menyelesaikan Konflik : Studi Kasus Antar Warga Masyarakat di Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.”***

Nama/Instansi	: Dodi Sanival/UIN Ar-Raniry
Nim	: 431307358
Prodi/Fakultas	: Manajemen Dakwah/Dakwah
Semester	: Ganjil
Alamat Sekarang	: Bait

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Di keluarkan : Desa Pasir Merapat  
Pada tanggal : 2 November 2017  
KEUCHIK DESA PASIR MERAPAT,





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
KECAMATAN KLUET SELATAN  
KEUCHIK DESA GEULUMBUK  
DESA GEULUMBUK – KODE POS 23772

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor: *4010*/2017

1. Sehubungan dengan surat dari Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry Nomor : B.3550/Un.08/FDK.I/PP.00.9/10/2017, Tanggal 17 Oktober 2017 perihal Mohon bantuan Keizinan Mengumpulkan Data Skripsi di wilayah Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan. Menerangkan bahwa benar yang namanya dibawah ini akan melakukan pengumpulan data/penelitian di Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan untuk kepentingan penyusunan Skripsi dengan judul ***“Peran Imeum Mukim dalam Menyelesaikan Konflik : Studi Kasus Antar Warga Masyarakat di Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.”***

Nama/Instansi	: Dodi Sanival/UIN Ar-Raniry
Nim	: 431307358
Prodi/Fakultas	: Manajemen Dakwah/Dakwah
Semester	: Ganjil
Alamat Sekarang	: Bait

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Di keluarkan : Desa Geulumbuk  
Pada tanggal 2 November 2017  
KEUCHIK DESA GEULUMBUK,  
  
HASLI MURDI

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Dodi Sanival  
NIM : 431307358  
Tempat/Tgl. Lahir : Desa Jua, 31 Oktober 1995  
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh - Aneuk Jamee  
Agama : Islam  
Kawin/Belum Kawin : Belum Kawin  
Alamat : Desa Jua Kecamatan Kluet Selatan  
Kabupaten Aceh Selatan, 23772  
Telephon/HP : 0822 - 7225 - 9457

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Muctadin  
Pekerjaan : Tani  
Ibu : Basnidar  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Jua Kecamatan Kluet Selatan  
Kabupaten Aceh Selatan, 23772

### 3. Pendidikan

a. MIN Kedai Kandang : Tahun 2001 - 2006  
b. MTsN Suak Bakong : Tahun 2006 - 2009  
c. SMAN 1 Kluet Selatan : Tahun 2010 - 2013  
d. Strata Satu (S1) : Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah  
dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Tahun 2013 - 2017

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 16 Januari 2018



**Dodi Sanival**  
NIM. 431 307 358